

UNIVERSITAS INDONESIA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG
TERHADAP ASEAN PADA MASA PERANG DINGIN DAN
SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DINGIN (1973-1993)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

DHINI AFIATANTI

0705080136

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI JEPANG
PENGUTAMAAN SEJARAH
DEPOK
JANUARI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

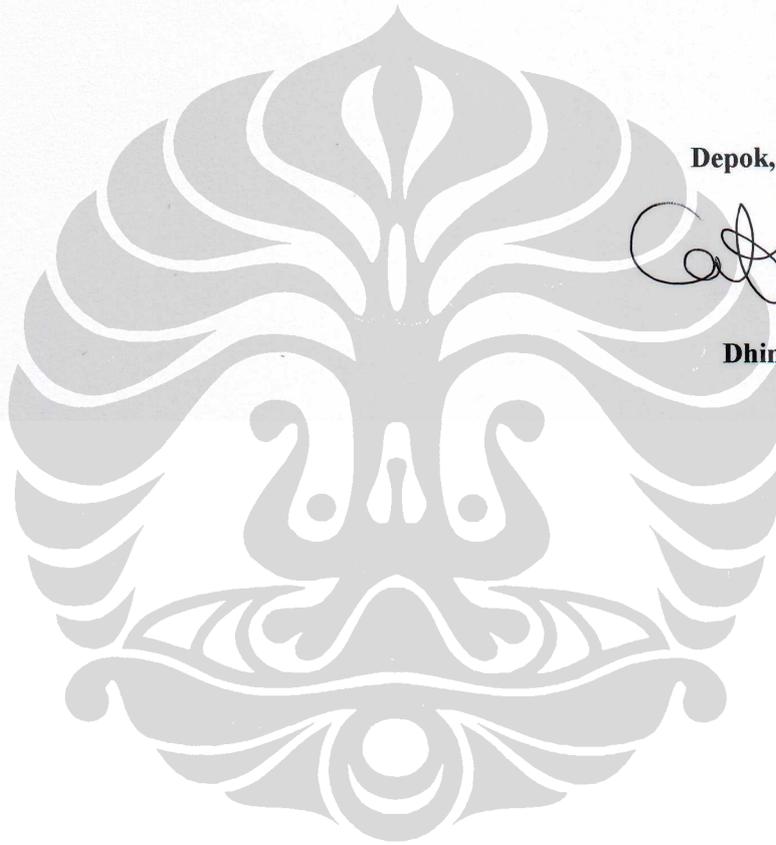
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, Januari 2010



Dhini Afiatanti

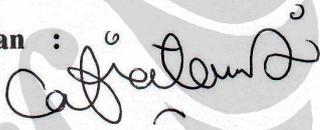


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dhini Afiatanti

NPM : 0705080136

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Januari 2010

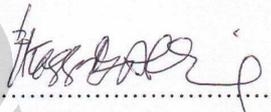
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

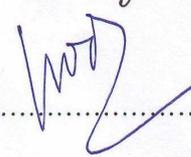
Nama : Dhini Afiatanti
NPM : 0705080136
Program Studi : Jepang
Judul Skripsi : Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin (1973-1993)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : M. Mossadeq Bahri S.S., M. Phil (.....)

Penguji : Yenny Simulya M.A. (.....)

Penguji : Endah Hayuni Wulandari M.Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok

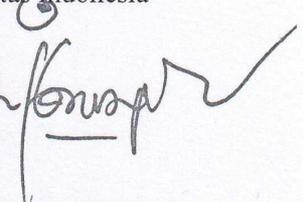
Tanggal : 7 Januari 2010

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia




Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 19651023 199003 1 00

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah serta nikmat dari-Nya, dalam waktu yang terbilang singkat, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN pada Masa Perang Dingin dan Setelah Berakhirnya Perang Dingin (1973-1993) ini. Dalam penyusunannya, saya selaku penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya, antara lain :

1. Bapak M. Mossadeq Bahri S.S., M. Phil selaku pembimbing skripsi serta Ibu Yenny Simulya M.A. dan Ibu Endah Hayuni Wulandari M. Hum selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan serta saran yang bermanfaat bagi skripsi saya.
2. Ibu Linda Sunarti M. Hum, pengajar Departemen Sejarah FIB-UI, yang telah banyak memberikan saran serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya sejak awal pengonsepan sampai dengan penarikan kesimpulan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi : Lian, Elyan, Retta, Noldi, Jungky, Indun dan Ijal serta semua personil “Capcuzt Yuumari”. Tanpa dukungan serta dorongan dari mereka saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Jepang 2005 serta para staf pengajar Program Studi Jepang FIB-UI yang selama masa studi telah banyak memberikan bantuannya kepada saya.
5. Mama, Papa dan Ewih yang selama ini senantiasa menjadi motivator saya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, besar harapan saya bahwa kelak skripsi ini bisa berguna bagi para pembaca dan dapat diterima di kalangan pemelajar sejarah Jepang dan ASEAN. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih.

(Dhini Afiatanti)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhini Afiatanti
NPM : 0705080136
Program Studi : Jepang
Fakultas: Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya saya yang berjudul :

**PERUBAHAN KEBIJAKANLUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN
PADA MASA PERANG DINGIN DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG
DINGIN (1973-1993)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dari pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 7 Januari 2010
Yang Menyatakan



(Dhini Afiatanti)

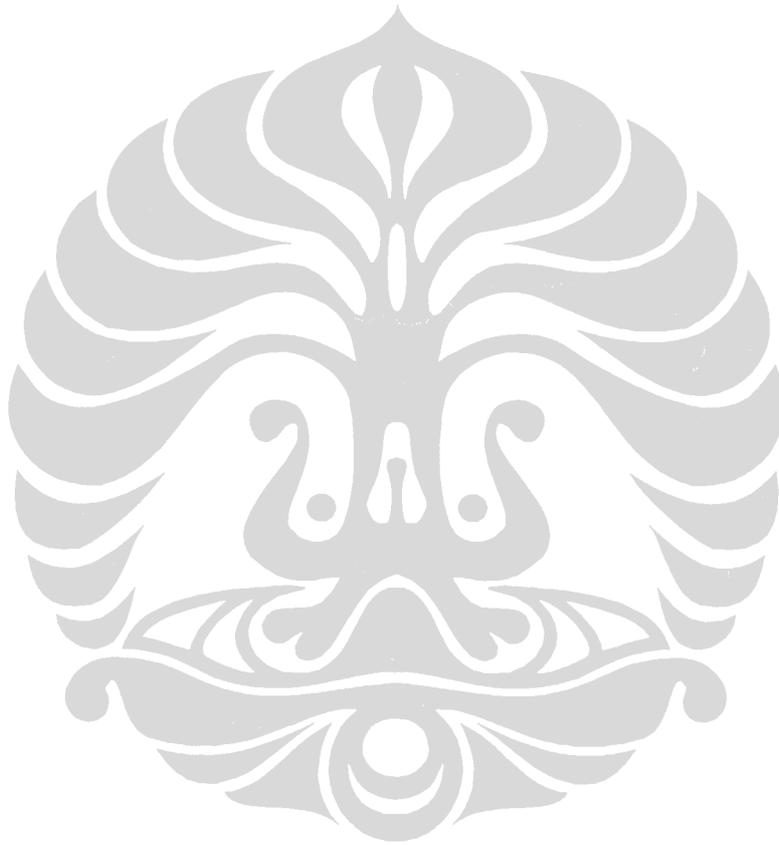
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2. KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG PADA MASA PERANG	
DINGIN DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DINGIN	
(1945-1991).....	10
2.1. Kebijakan Luar Negeri Jepang pada Masa Perang Dingin (1945-1991)....	10
2.1.1. Kebijakan Luar Negeri Jepang pada Masa Pendudukan Sekutu	
(1945-1951).....	10
2.1.2. Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Pendudukan Sekutu sampai	
dengan Berakhirnya Perang Dingin	
(1951-1991).....	13
2.2. Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991.....	15

2.3. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991.....	17
2.3.1. Faktor Eksternal.....	17
2.3.1.1. Permintaan <i>Burden-sharing</i> dari Amerika Serikat.....	17
2.3.1.2. Trauma Jepang pasca Perang Teluk 1990-1991.....	19
2.3.1.3. Faktor Cina dan Dua Korea : Kebutuhan Jepang terhadap Kepastian Stabilitas Regional pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991.....	21
2.3.1.4. Konflik Laut Cina Selatan.....	23
2.3.2. Faktor Internal.....	25
BAB 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN PADA MASA PERANG DINGIN DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DINGIN (1973-1993).....	28
3.1. Ikhtisar Sejarah Hubungan Jepang-ASEAN.....	28
3.2. Kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada Masa Perang Dingin (1973-1991).....	33
3.2.1. Kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Jepang terhadap ASEAN pada Masa Perang Dingin (1973-1991).....	33
3.2.2. Forum ASEAN-Jepang Pertama sampai ke-12.....	36
3.3. Kebijakan Jepang terhadap ASEAN setelah Berakhirnya Perang Dingin 1991.....	40
3.3.1. Proposal Nakayama 1991.....	40
3.3.2. Forum ASEAN-Jepang ke-13.....	42
3.3.3. <i>ASEAN Regional Forum</i> 1993.....	43
BAB 4. KESIMPULAN.....	46
DAFTAR REFERENSI.....	49
LAMPIRAN.....	53

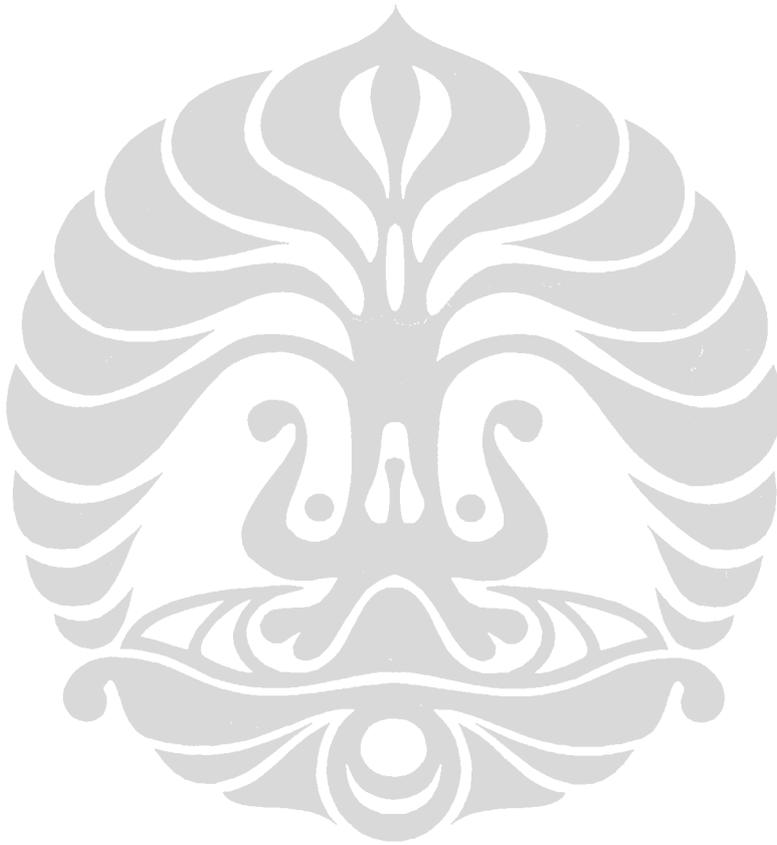
DAFTAR GAMBAR

Survei Menteri Pertahanan Jepang mengenai Pro dan Kontra dalam negeri Jepang terhadap meningkatnya partisipasi Jepang dalam peran internasional tahun 2006.....	26
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947	53
Lampiran 2. Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1951	54
Lampiran 3. <i>Joint Press Release</i> Forum ASEAN-Jepang Pertama sampai ke-13	56
Lampiran 4. Doktrin Yoshida.....	75



ABSTRAK

Nama : Dhini Afiatanti
Program Studi : Jepang
Judul : Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin (1973-1993)

Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena munculnya masalah di dalam negeri negara yang bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadi di lingkungan internasional negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Jepang merubah kebijakan luar negerinya secara umum. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga turut berdampak pada kerjasamanya dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Proposal Nakayama, penambahan lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, serta bergabungnya Jepang dengan *ASEAN Regional Forum* bentukan ASEAN.

Kata Kunci :
kebijakan luar negeri Jepang, ASEAN, Perang Dingin

ABSTRACT

Name : Dhini Afiatanti
Study Program : Japanese
Topic : Alteration of Japanese Foreign Policy towards ASEAN during
the Cold War and Afterwards (1973-1993)

The content of this thesis is focused on Japanese foreign policy towards ASEAN during Cold War and its alteration when the war ended in 1991. The thesis takes year 1973 until year 1993 as its time scope. Alteration of one's foreign policy might be caused by its domestic fluctuation or another event happens in international environment surrounds the country. When Cold War ended in 1991, Japan altered its foreign policy in general. Issues happened in international environment is assumed as dominant factors causing the alteration. The alteration of Japanese foreign policy in general also impacts its diplomatic relation with association of Southeast Asia nations, commonly known as ASEAN. It was marked by submission of Nakayama's Initiative, field cooperation additions in ASEAN-Japan Forum and Japan's pioneering as well as its participation in ASEAN Regional Forum founded by ASEAN.

Key words :

Japanese foreign policy, ASEAN, Cold War

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang melalui Perdana Menteri Suzuki Kantarou mengakui Deklarasi Postdam. Deklarasi Postdam merupakan deklarasi yang berisi 13 pasal untuk menetapkan syarat-syarat penyerahan bagi Jepang pasca kekalahannya pada Perang Dunia II.¹ Pada pasal kedua dan ketiga dari 13 pasal Deklarasi Postdam dinyatakan bahwa Jepang akan diduduki oleh sekutu sampai tercapainya tujuan demiliterisasi dan demokratisasi di negara tersebut.² Sekutu dalam hal ini Amerika Serikat, telah banyak melakukan perubahan fundamental selama kurang lebih tujuh tahun masa pendudukannya. Salah satunya adalah perubahan mengenai konstitusi negara serta aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pergaulan Jepang di dunia internasional.³

Contoh konkrit perubahan konstitusional yang dilakukan oleh sekutu adalah pembuatan Konstitusi Jepang 1947. Konstitusi Jepang 1947 merupakan undang-undang dasar Jepang yang sebagian besar konsepnya disusun oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1946.⁴ Dalam Konstitusi Jepang 1947 tersebut, terdapat Pasal 9 yang isinya berkaitan erat dengan demiliterisasi serta dasar kebijakan luar negeri Jepang.

Berikut ini adalah isi dari Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947 tersebut.

“一 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争
を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。国の交戦権は、これを認めない。”⁵

¹ *Occupation of Japan : Policy and Progress*. U.S. Department of State. hlm 38.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* hlm 7.

⁴ *The New Global Politics of the Asia-Pacific*. Michael K. Connors. hlm 38.

⁵ *Article 9 of the Japanese Constitution*

http://en.wikipedia.org/wiki/Article_9_of_the_Japanese_Constitution (Desember 2008)

“1. Rakyat Jepang dengan ini dengan tulus menghendaki perdamaian internasional yang berdasarkan keadilan dan norma-norma serta tidak mengakui adanya perang dan penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik internasional.

2. Dalam rangka mencapai tujuan dari pasal sebelumnya, angkatan laut, darat, udara serta kekuatan militer lainnya tidak akan dipelihara. Hak perang negara tidak akan diakui.”

Dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947 tersebut ditegaskan bahwa negara Jepang tidak mengakui adanya perang serta penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik internasional. Pasal ini secara tidak langsung juga membatasi ruang lingkup kerjasama Jepang dalam menjalin hubungan terutama bidang keamanan dan stabilitas wilayah dengan negara lain selama berlangsungnya masa pendudukan sekutu (1945-1951) sampai dengan berakhirnya Perang Dingin tahun 1991.⁶

Masa pendudukan sekutu di Jepang berakhir setelah penandatanganan Perjanjian San Fransisco tahun 1951⁷. Berakhirnya masa pendudukan sekutu tersebut sama sekali tidak mengurangi fungsi dari Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947. Hal ini bisa dilihat dari kerjasama-kerjasama kenegaraan Jepang yang pada masa itu tidak dititikberatkan pada bidang militer dan stabilitas wilayah melainkan lebih banyak didominasi oleh bidang ekonomi, pendidikan serta budaya.⁸

Meskipun demikian, karakter hubungan luar negeri Jepang yang banyak dititikberatkan pada bidang ekonomi, pendidikan serta budaya tersebut hanya bertahan sampai dengan berakhirnya Perang Dingin di awal tahun 1990-an. Perang Dingin merupakan perang ideologi dan pengaruh antara dua poros besar, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, pasca Perang Dunia II. Perang Dunia II telah memunculkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan besar dunia. Pada perkembangannya, kedua poros kekuatan ini saling bersaing dalam segala

⁶ *The Lack of Security Cooperation between Southeast Asia and Japan : Yen Yes, Pax Nippon No.* Sandra R. Leavitt. hlm 223.

⁷ Perjanjian San Fransisco merupakan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Jepang dan 49 negara lain pada 8 September 1951 dengan tujuan mengakhiri secara resmi Perang Dunia II serta menandai berakhirnya pendudukan sekutu di negara tersebut. Lih. *Treaty of San Fransisco* (http://en.wikipedia.org/wiki/treaty_of_san_fransisco) (Juni 2009)

⁸ *Japan's Political and Security Relations with ASEAN* oleh Nishihara Masashi dalam *ASEAN-Japan Cooperation : A Foundation for East Asian Community*. Pamela J. Noda. hlm 153.

bidang selama tiga dasawarsa. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan dukungan serta pengaruh dari negara-negara lain khususnya negara-negara dunia ketiga. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini dimulai sejak meletusnya Peristiwa Berlin 1947 dan baru berakhir pada tahun 1991 ketika Uni Soviet runtuh dan mengalami disintegrasi.⁹

Pada masa Perang Dingin, kondisi ekonomi negara-negara di dunia mengalami kehancuran akibat Perang Dunia II. Sebagian besar negara yang ekonominya hancur tersebut mengalami bipolarisasi atau terbagi menjadi dua poros, poros Barat dan poros Timur. Negara yang memihak poros Barat adalah negara yang mendukung Amerika Serikat dengan paham liberalismenya, sedangkan negara yang memihak poros Timur adalah negara yang mendukung Uni Soviet dengan paham komunisnya.¹⁰

Selama berlangsungnya Perang Dingin, masalah keamanan Jepang dijamin dan dilindungi oleh Amerika Serikat secara efektif. Hal tersebut ditegaskan dalam pembukaan Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1951 (*Security Treaty between The United States and Japan 1951*) yang ditandatangani pada 8 September 1951. Berikut adalah kutipan dari pembukaan Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1951 :

“...Japan desires, as a provisional arrangement for its defense, that the United States of America should maintain armed forces of its own in and about Japan so as to deter attack upon Japan. The United States of America, in the interest of peace and security, is presently willing to maintain certain of its armed forces in and about Japan...”¹¹

Dalam Perjanjian Kerjasama Keamanan tersebut dinyatakan bahwa Amerika Serikat akan menyediakan perlindungan secara militer bagi Jepang yang sedang menjalani proses demiliterisasi selama pendudukan sekutu. Penjaminan keamanan Jepang oleh Amerika Serikat tersebut menyebabkan munculnya suatu kepercayaan naif di kalangan masyarakat serta pemerintah Jepang bahwa berada pada aliansi Barat akan membuat negaranya aman dan nyaman. Hal tersebut dinyatakan dengan

⁹ *Seperempat Abad ASEAN*. CPF Luhulima dkk. hlm 41.

¹⁰ *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*. Glenn D. Hook. hlm 32.

¹¹ *Ibid.* hlm 561.

tegas oleh Kato Ryozo, Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat. Dalam tulisannya *Change and Post-Cold War Japanese Security : Alliance vs. Community of Shared Destiny* beliau menyampaikan : “...*During the Cold War, there was a naive belief among the Japanese that being affiliated with the Western Alliance would provide Japan with safety and Comfort.*”¹²

Namun demikian, kepercayaan tersebut akhirnya pudar pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991. Kato Ryozo melanjutkan : “...*Today, however, we can no longer make such an assumption. Now is a time to test what it really means to share core values and principles as opposed to shared interests.*”¹³ Melalui pernyataan tersebut, Kato Ryozo menyatakan bahwa Jepang saat ini tidak bisa lagi berasumsi bahwa negaranya akan aman hanya karena lindungan dari kekuatan Barat.

Pudarnya kepercayaan terhadap pemikiran naif di kalangan masyarakat dan Pemerintah Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah perubahan lingkungan internasional pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 yang menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan dari dalam negeri Jepang. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Jepang untuk meninjau ulang masalah keamanan dalam negerinya dan merevisi kembali konsep kebijakan luar negerinya.¹⁴

Perubahan konsep kebijakan luar negeri Jepang tersebut membuat Jepang mulai melibatkan diri secara langsung pada bidang-bidang kerjasama yang berkaitan dengan masalah militer. Salah satu contoh keterlibatan Jepang adalah keputusan Pemerintah Jepang untuk ambil bagian dalam beberapa operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Pasca berakhirnya Perang Dingin, Jepang beberapa kali turut serta dalam pengiriman *Self-defense Force* atau Pasukan Bela Diri miliknya ke daerah-daerah konflik seperti Timor Leste, Kamboja, Mozambik dan Dataran Tinggi Golan.¹⁵

Perubahan pola kerjasama juga terjadi dalam hubungan Jepang dengan organisasi kewilayahan Asia Tenggara atau yang disebut dengan ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*). ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan

¹² *Change and Post-Cold War Japanese Security : Alliance vs. Community of Shared Destiny*. Kato Ryozo. hlm 23.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Japan's Security Policy in 1990s* oleh Tanaka Akihiko dalam *Japan's International Agenda*. Funabashi Yoichi. hlm 28.

¹⁵ Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 153.

Singapura. ASEAN merupakan organisasi regional di wilayah Asia Tenggara yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya di antara negara-negara anggotanya.¹⁶

ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara telah didirikan sejak tahun 1967, namun pemerintah Jepang baru memberikan perhatian kepada ASEAN sejak tahun 1970-an ketika ditandatanganinya Deklarasi Kuala Lumpur 1971.¹⁷ Pada tahun 1955 sampai dengan 1967, hubungan Jepang dengan wilayah Asia Tenggara lebih banyak didominasi oleh masalah tuntutan pampasan perang oleh sebagian negara Asia Tenggara yang dulunya merupakan negara bekas jajahan Jepang.¹⁸ Barulah pada tahun 1973, hubungan Jepang dan ASEAN dimulai kembali dengan diadakannya suatu pertemuan informal yang dinamakan *Synthetic Rubber Forum* atau Forum Karet Sintesis.

Synthetic Rubber Forum atau Forum Karet Sintesis adalah pertemuan yang membahas mengenai komoditi karet sintesis. Pertemuan ini pada awalnya diadakan sebagai akibat dari perluasan industri karet sintesis Jepang yang merugikan industri karet alam negara-negara ASEAN, terutama Malaysia. Walaupun kritik besar-besaran hanya datang dari Malaysia, hal tersebut pada akhirnya membawa Jepang dan ASEAN kepada hubungan dengan lingkup yang lebih formal di tahun 1974 dengan diadakannya Forum Karet Sintesis yang kedua.¹⁹ Hubungan kerjasama melalui Forum Karet Sintesis tersebut kemudian secara resmi diakhiri pada Maret 1977 dengan dibentuknya pertemuan baru yang dinamakan Forum ASEAN-Jepang.²⁰ Forum ini pada akhirnya menjadi forum yang penting bagi hubungan Jepang dan ASEAN di masa-masa selanjutnya.

Seiring dengan perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang yang dilatarbelakangi berakhirnya Perang Dingin, bidang kerjasama Jepang dan ASEAN pun semakin meluas. Kerjasama yang pada awalnya hanya menitikberatkan masalah-masalah ekonomi,²¹ berangsur-angsur mulai merambah ke bidang politik

¹⁶ *Gendai Nihon Tounan Aja Seisaku 1950-2005*. Hatano Sumio dkk. hlm 160

¹⁷ *Japan and ASEAN in the Second Decade* oleh Matsumoto Saburo dalam *Twenty Years of ASEAN : Its survival and Development*. Okabe Tatsumi. hlm 73.

¹⁸ *The International Relations of Japan and Southeast Asia : Forging a New Regionalism*. Suelo Sudo. hlm 2.

¹⁹ *Understanding ASEAN*. Alison Broinowski. hlm 180.

²⁰ *Asean-Selayang Pandang 1992*. Sekretariat Nasional ASEAN. hlm 160.

²¹ *ASEAN's Political and Security Relations with Japan* oleh Mohamed Jawhar Bin Hassan. Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 146.

dan stabilitas wilayah.²² Proposal Nakayama serta penambahan lingkup kerjasama dalam Forum ASEAN-Jepang merupakan contoh konkrit adanya perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin 1991.

Pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur tahun 1991, Jepang secara resmi mengajukan Proposal Nakayama yang berkaitan dengan kerjasama dalam bidang keamanan dan stabilitas wilayah.²³ Kemudian dalam Forum ASEAN-Jepang yang diadakan pertama kali setelah berakhirnya Perang Dingin, beberapa bidang kerjasama seperti keamanan dan stabilitas wilayah juga mulai ditambahkan dalam agenda resmi hubungan Jepang dan ASEAN.²⁴

Hubungan Jepang dan ASEAN pada masa kontemporer ini telah memasuki babak baru yang berbeda dengan hubungan pada dekade 1970-an sampai 1980-an. Jepang kembali mempedulikan masalah stabilitas wilayah dan politik di kawasan Asia Tenggara seperti ketika Perang Dunia II. Hal tersebut merupakan hal yang ironis, sebab pada awalnya Jepang secara tegas menolak pengembangan institusi-institusi keamanan di wilayah Asia Tenggara.²⁵

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, melalui penyusunan skripsi yang diberi judul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin (1973-1993) ini, akan dijabarkan mengenai perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN serta beberapa hal lain yang terkait dengan perubahan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk mengembangkan permasalahan yang telah dijelaskan pada subbab latar belakang diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan selanjutnya mengenai :

1. Bagaimana kebijakan luar negeri Jepang secara umum pasca kekalahannya di Perang Dunia II 1945 sampai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri tersebut ketika Perang Dingin berakhir di tahun 1991?

²² *Japan's Political Security Relations with ASEAN*. Nishihara Masashi. hlm 153.

²³ "The New Player" *Far Eastern Economic Review* 1 Agustus 1991. Michael Vatikotis.

²⁴ lih. *ASEAN Document Series 1992-1994 Supplementary Edition*. ASEAN Sekretariat. hlm 80-81

²⁵ *Japan's Regional Security Policy in Post-Cold War Asia*. Lisa J. Sansoucy. hlm 160.

2. Apa saja faktor eksternal dan internal yang menyebabkan perubahan dalam kebijakan luar negeri Jepang tersebut?
3. Perubahan kebijakan Jepang seperti apa yang terjadi pada pola hubungan Jepang dan ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 serta apa yang membedakannya dengan kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada masa ketika Perang Dingin berlangsung?

1.3. Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, pembahasan penelitian ini akan dibatasi hanya mengenai perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin. Namun demikian, sebagai gambaran terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kebijakan luar negeri Jepang pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin secara umum.

Batasan waktu yang akan dipakai adalah sejak dimulainya kontak antara Jepang dengan ASEAN secara resmi melalui Forum ASEAN-Jepang yang pertama pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1993 ketika *ASEAN Regional Forum (ARF)* dibentuk. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis sejarah, oleh karena itu peristiwa berakhirnya Perang Dingin dijadikan acuan waktu untuk mempermudah pengumpulan data.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menjabarkan bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin serta memaparkan faktor-faktor baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi Jepang dalam perubahan kebijakan luar negerinya pasca berakhirnya Perang Dingin 1991.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metodologi sejarah, yaitu berusaha mencari dan mengolah data-data yang didapatkan secara sistematis dan teratur. Metodologi ini diawali dengan tahap *heuristik*, yaitu pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan antara lain Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947, Perjanjian Kerjasama

Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1951, *Joint Press Release Forum ASEAN-Jepang pertama sampai ke-13*, dan Doktrin Yoshida. Sumber sekunder yang akan digunakan antara lain buku-buku seperti *The New Global Politics of The Asia-Pacific* karangan Michael K. Connors dan *ASEAN-Japan Cooperation : A Foundation for East Asian Community* editan Pamela J. Noda, jurnal-jurnal seperti *Asian Survey*, *Pacific Affairs* dan *Pacific Review*, artikel baik dari majalah maupun surat kabar serta beberapa publikasi elektronik.

Tahap kedua adalah tahap kritik, yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kritik dilakukan dengan cara memeriksa silang kebenaran untuk membandingkan suatu buku dengan sumber yang lain. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta yang terkumpul. Dalam tahap ini fakta-fakta yang ada dicoba untuk diklarifikasi satu sama lain, sekaligus dilihat apakah ada keterkaitan antara fakta yang satu dengan yang lainnya.

Pada tahap penulisan skripsi, metode penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah eksposisi deskriptif dengan pendekatan historis. Fakta-fakta sejarah yang ditemukan akan diseleksi, disusun, diberi penekanan, dan ditempatkan dalam suatu urutan kronologis yang sistematis.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab poin-poin pertanyaan yang telah dijabarkan pada subbab Perumusan Masalah di atas secara lebih sistematis, maka penulis akan membagi skripsi ini ke dalam empat bab, antara lain :

Bab 1 berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 berisi kebijakan luar negeri Jepang secara umum sejak kealahannya dalam Perang Dunia II, pada masa pendudukan sekutu (1945-1951) sampai dengan berubahnya kebijakan luar negeri Jepang tersebut ketika Perang Dingin berakhir tahun 1991. Melalui penjabaran tersebut, akan dianalisis beberapa faktor eksternal dari luar negeri Jepang serta faktor internal dalam negeri Jepang yang menyebabkan Jepang mengambil keputusan untuk mengubah kebijakan luar negerinya pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Bab 2 ini terdiri dari tiga subbab pembahasan. Subbab pertama akan menjabarkan mengenai kebijakan luar negeri Jepang pada

masa Perang Dingin (1945-1991). Subbab yang kedua adalah mengenai kebijakan luar negeri Jepang pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Subbab yang terakhir akan menguraikan mengenai faktor-faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri Jepang pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 yang akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Bab 3 berisi hubungan Jepang dan ASEAN pada saat berlangsungnya Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1991. Penjabaran dalam bab ini akan dibagi dalam tiga subbab. Pada subbab pertama akan dijelaskan mengenai ikhtisar hubungan Jepang dan ASEAN. Pada subbab kedua akan dijabarkan mengenai kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin. Subbab yang kedua ini terdiri atas dua bagian, yaitu kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Jepang dan Forum ASEAN-Jepang pertama sampai dengan ke-12. Selanjutnya pada subbab ketiga akan diuraikan mengenai kebijakan Jepang terhadap ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin yang terdiri dari tiga subbahasan, yaitu Proposal Nakayama 1991, Forum ASEAN-Jepang ke-13 dan *ASEAN Regional Forum*. Bab III ini merupakan inti dari skripsi karena dalam bab ini akan dijabarkan mengenai perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN ketika Perang Dingin berakhir di awal dekade 1990-an.

Bab terakhir, yaitu Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan di dalam skripsi ini.

BAB 2

KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG PADA MASA PERANG DINGIN DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DINGIN 1945-1991

Pada masa pendudukan sekutu (1945-1951) sampai dengan berakhirnya Perang Dingin 1991, Jepang berada dibawah payung aliansi Amerika Serikat secara militer. Pada masa tersebut, Jepang menjalankan kebijakan luar negeri yang menitikberatkan kerjasamanya pada masalah-masalah ekonomi dan pembangunan negaranya. Namun demikian, ketika Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, perhatian Jepang mulai bertambah. Jepang menjadi lebih memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah stabilitas dunia internasional.¹

Pada pembahasan selanjutnya, akan diuraikan mengenai kebijakan luar negeri Jepang pada masa pendudukan sekutu sampai dengan perubahan yang terjadi pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai beberapa faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut.

2.1. Kebijakan Luar Negeri Jepang Pada Masa Perang Dingin (1945-1991)

Untuk mempermudah penjabaran mengenai kebijakan luar negeri Jepang pada masa Perang Dingin, pembahasan dibagi berdasarkan dua periode. Periode yang pertama yaitu masa Pendudukan Sekutu tahun 1945-1951 dan periode yang kedua pasca Pendudukan Sekutu tahun 1951 sampai dengan berakhirnya Perang Dingin tahun 1991.

2.1.1. Kebijakan Luar Negeri Jepang Pada Masa Pendudukan Sekutu (1945-1951)

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II menyebabkan Jepang harus menanggung dua konsekuensi besar. Konsekuensi yang pertama yaitu pendudukan sekutu di negaranya sekaligus menerima Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya.² Pendudukan sekutu di Jepang berlangsung dari tahun 1945 dan berakhir pada tahun 1951 ketika Perjanjian San Fransisco ditandatangani. Secara *de facto*, Amerika Serikat baru menarik pasukannya dari Jepang pada tahun 1952. Konsekuensi yang

¹ *Ibid.*

² Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 37.

kedua yaitu Jepang harus rela untuk kehilangan kedaulatan dalam menentukan kebijakan luar negerinya sendiri. Menurut Michael K. Connors, sebagai akibat dari konsekuensi yang kedua ini, Jepang pasca Perang Dunia telah tamarjinalisasikan dari konstruksi struktur baru dunia internasional.³

Pendudukan Jepang 1945-1951 memiliki tujuan utama menciptakan Jepang baru yang diharapkan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kepentingan Barat serta tatanan dunia internasional.⁴ Oleh karena itu, selama masa pendudukan sekutu, segala urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri Jepang berada di bawah yuridiksi SCAP (*Supreme Commander for the Allied Powers*)⁵. SCAP memiliki dua belas departemen yang masing-masing bertugas untuk mengontrol kehidupan bernegara di Jepang. Salah satu departemen dari SCAP adalah *The Diplomatic Section* yang bertugas untuk menangani masalah yang berkaitan dengan hubungan Jepang dengan negara lain.⁶

Dibawah kendali SCAP tersebut, dapat dikatakan bahwa Jepang hampir tidak memiliki diplomasi ke luar negaranya. Diplomasi utama Jepang hanyalah berkisar mengenai masalah-masalah domestik yang terkait dengan kekuatan pendudukan serta hubungannya dengan SCAP itu sendiri.⁷ Bahkan dapat dikatakan bahwa selama kurang lebih tujuh tahun masa pendudukan sekutu, Jepang secara nyata telah terasingkan dari wilayah Asia dalam kaitannya dengan bidang ekonomi, keamanan dan politik.⁸

Jepang dibawah kendali SCAP juga telah menyusun Konstitusi 1947 yang masih menjadi Undang-undang Dasar Jepang sampai dengan saat ini. Pada Konstitusi 1947 inilah terdapat Pasal 9 yang menjadi dasar demiliterisasi Jepang. Pasal 9 Konstitusi 1947 tersebut merupakan salah satu latar belakang mengapa Jepang tidak pernah ikut campur terhadap masalah-masalah internasional yang

³ Yang disebut dengan konstruksi struktur baru dunia internasional pasca Perang Dunia II adalah terbaginya negara-negara di dunia menjadi dua poros, yaitu poros Barat dan poros Timur. Pada masa pendudukan sekutu (1945-1951), Jepang banyak berkonsentrasi dengan urusan dalam negerinya yang berkaitan dengan hubungannya dengan sekutu. Hal tersebut mengakibatkan Jepang tidak memiliki diplomasi ke luar negaranya sehingga secara otomatis Jepang tersingkirkan atau tamarjinalisasikan dari konstruksi struktur baru dunia internasional. Lih. *Ibid.*

⁴ *Ibid.* hlm 38.

⁵ SCAP (*Supreme Commander of the Allied Powers*) merupakan kekuasaan tertinggi pemerintah pendudukan sekutu di Jepang yang dibentuk pada 2 Oktober 1945 bersamaan dengan pendirian sebuah markas besar sekutu di Tokyo. Lih. *Occupation of Japan : Policy and Progress.* hlm 63.

⁶ U.S. Department of State. *Op. Cit.*, hlm 15.

⁷ *Japan's Foreign Relations.* Katsuo Okazaki. hlm 156.

⁸ Alison Broinowski. *Op. Cit.*, hlm 170. *Building a Neighborly Community.* Daojiong Zha. hlm 85.

berkaitan dengan keamanan dan stabilitas wilayah.⁹

Namun demikian, Pasal 9 Konstitusi Jepang tersebut bukanlah satu-satunya dasar yang mengatur pola kebijakan luar negeri Jepang pada masa Perang Dingin. Di awal Perang Dingin, Perdana Menteri Yoshida Shigeru¹⁰ mengeluarkan tiga prinsip fundamental yang menandai pendekatan taktikal Jepang untuk menghadapi kondisi Perang Dingin dalam kaitannya terhadap aliansinya dengan Amerika Serikat. Tiga prinsip tersebut antara lain :

1. Rehabilitasi ekonomi Jepang haruslah menjadi tujuan nasional yang utama. Kerja sama politik-ekonomi dengan Amerika Serikat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan ini.
2. Jepang harus menjadi negara yang tidak memiliki militer dan menghindari keterlibatan dalam isu-isu politik-strategi dunia internasional. *Self Defense Force* atau Tentara Pertahanan Jepang tidak akan ditempatkan keluar dan Jepang tidak akan berpartisipasi dalam perjanjian atau kerjasama kolektif yang berkaitan dengan pertahanan keamanan.
3. Untuk mendapatkan jaminan dalam waktu yang lama mengenai keamanan dalam negerinya sendiri, Jepang akan menyediakan basis militer untuk angkatan darat, laut dan udara Amerika Serikat di negaranya.¹¹

Tiga prinsip yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru tersebut menekankan bahwa pola dasar hubungan internasional Jepang pasca berakhirnya Perang Dunia II akan terkonsentrasi pada pembangunan kembali dalam negerinya. Jepang juga menolak keterlibatan dalam perjanjian maupun kerjasama kolektif dalam bidang keamanan. Di sisi lain, Jepang menggantungkan politik dan keamanannya kepada Amerika Serikat.¹² Tiga prinsip Perdana Menteri Yoshida ini pada akhirnya tidak hanya berlaku pada masa pendudukan sekutu saja, melainkan juga menjadi dasar kebijakan luar negeri Jepang untuk empat puluh tahun

⁹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 38.

¹⁰ Yoshida Shigeru menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang selama empat periode, yaitu 22 Mei 1946-24 Mei 1947, 15 Oktober 1948-16 Februari 1949, 16 Februari 1949-30 Oktober 1952 dan 30 Oktober 1952-10 Desember 1954. Lih. Glenn D. Hook. *Op. Cit.*, hlm 560.

¹¹ *Japan Rising : The Resurgence of Japanese Power and Purpose*. Kenneth B. Pyle. hlm 242.

¹² Glenn D. Hook. *Op. Cit.*, hlm 32.

selanjutnya.¹³

Pada masa pendudukan sekutu, Jepang hampir tidak punya hubungan diplomasi ke luar negaranya dan muncul isu bahwa munculkan isu bahwa Kementerian Luar Negeri Jepang akan dihapus oleh SCAP. Namun, pada tahun 1950, Kementerian Luar Negeri Jepang secara resmi kembali mendapatkan fungsi dan tugasnya. Pengembalian fungsi dari Kementerian Luar Negeri Jepang tersebut ditandai dengan dibangunnya tujuh *Japanese Overseas Agencies* di beberapa kota besar negara-negara di dunia serta dikirimnya staf diplomatik resmi ke negara-negara tersebut. Namun demikian, sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam tiga prinsip Perdana Menteri Yoshida, tugas utama dari para staf tersebut dibatasi hanya pada isu yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi Jepang dengan negara terkait.¹⁴

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Pendudukan Sekutu sampai dengan Berakhirnya Perang Dingin (1951-1991)

Pasca penandatanganan Perjanjian San Fransisco 1951, Jepang kembali mendapatkan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dengan diakhirinya masa pendudukan sekutu. Layaknya suatu negara yang baru memperoleh kemerdekaannya, Jepang pun kembali menjalankan perannya sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional. Hal tersebut dibuktikan pada konferensi San Fransisco 1951 yang menyebutkan bahwa pasca berakhirnya pendudukan sekutu, salah satu tujuan negara Jepang adalah untuk memperbaiki hubungannya dengan banyak negara lain secepatnya.¹⁵ Tidak ada pilihan lain bagi Jepang, sebab pada saat itu Jepang tidak lebih dari mantan musuh bukan hanya bagi sebagian besar negara-negara Asia melainkan juga bagi seluruh dunia seperti yang disampaikan oleh Akio Watanabe :

“...Nothing was certain, however, about Japan’s relations with Asia even after the conclusion of the San Francisco peace treaty in September 1951. Japan was, more than anything else, a former enemy not

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Katsuo Okazaki. *Op. Cit.*, hlm 156.

¹⁵ *Ibid.* hlm 158.

only to most of the Asian countries but also to the rest of the world."¹⁶

Penguatan hubungan dengan negara lain selain Amerika Serikat ini disebut dengan *zenhoi gaikou* atau diplomasi omnidireksi.¹⁷

Menjadi negara yang merdeka juga membuat Jepang harus kembali memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya secara penuh. Pada April 1952, Jepang memiliki populasi sebanyak 87 juta jiwa. Ditambah lagi, Jepang bukanlah negara dengan sumber daya alam yang kaya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, Jepang mau tidak mau harus meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara lain.¹⁸

Hal tersebut merupakan salah satu sebab karakteristik diplomasi serta kebijakan luar negeri Jepang sama sekali tidak mengalami perubahan pasca pendudukan sekutu. Jepang tetap menitikberatkan kerjasama-kerjasama luar negerinya pada bidang-bidang komersial seperti ekonomi dan perdagangan.¹⁹ Menurut Martin E. Weinstein, ketika masa pendudukan sekutu berakhir, Jepang masih berpijak pada suatu persepsi terkait dengan kepentingan negaranya. Persepsi tersebut mengedepankan pembangunan kestabilan ekonomi industri yang kompetitif sebagai tujuan utama kebijakan nasional negaranya, dan tujuan tersebut secara mutlak dibebankan pada kebijakan luar negeri Jepang itu sendiri.²⁰

Di bawah dua Perdana Menteri Jepang, Ikeda Hayato (Juli 1960-November 1964) dan Satou Eisaku (November 1964-Juli 1972), pada tahun 1960-an melalui suatu konsensus, tiga prinsip yang disampaikan oleh Perdana Menteri Yoshida di awal Perang Dingin kembali dijadikan dasar utama kebijakan luar negeri Jepang sekaligus diperkuat menjadi suatu strategi yang lebih sistematis.²¹ Pada konsensus tersebut, tiga prinsip Yoshida itu kemudian diabadikan dengan nama Doktrin Yoshida.²² Tidak hanya itu, selama berlangsungnya Perang Dingin, Doktrin Yoshida juga dipakai sebagai strategi oleh Jepang dalam rangka melindungi keamanan militer

¹⁶ *Southeast Asia in U.S.-Japanese Relations* oleh Akio Watanabe dalam *Japan and South East Asia volume 2*. Wolf Mendl. hlm 30.

¹⁷ Diplomasi Omnidireksi adalah diplomasi ke segala arah. Bagi Jepang, Diplomasi Omnidireksi merupakan diplomasi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan serta kerjasamanya dengan negara lain selain Amerika Serikat pasca pendudukan sekutu di negaranya. Lih. Glenn D. Hook. *Op. Cit.*, hlm 34.

¹⁸ Katsuo Okazaki. *Op. Cit.*, hlm 158.

¹⁹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 40.

²⁰ *Japan's Foreign Policy Options : Implications for the United States* oleh Martin E. Weinstein dalam *Japan's Foreign Policy after the Cold War : Coping with Change*. Gerald L. Curtis. hlm 218-219.

²¹ Kenneth B. Pyle. *Op. Cit.*, hlm 242.

²² Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 38.

serta kestabilan politik negaranya dari ancaman komunisme Soviet.²³

Perdana Menteri Ikeda Hayato kembali menguatkan Doktrin Yoshida sebagai dasar hubungan internasional Jepang dengan mengeluarkan *Income Doubling Plan* atau rencana penggandaan pemasukan. Rencana penggandaan pemasukan ini nantinya akan lebih dikenal dengan paham *GNPisme* Ikeda.²⁴ Dengan dikeluarkannya rencana tersebut, diplomasi Jepang semakin menitikberatkan kerjasama-kerjasama luar negerinya dalam bidang ekonomi dan pembangunan dalam negeri.

Setelah pemerintahan Ikeda berakhir pun, keberadaan LDP (*Liberal Democratic Party*) sebagai satu-satunya partai yang berkuasa di Jepang dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1993 masih menunjukkan kekuatan *GNPisme* dan Doktrin Yoshida dengan mempertahankan keduanya sebagai landasan kebijakan luar negerinya.²⁵

2.2. Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin yang telah mencekam dunia selama kurang lebih lima dekade.²⁶ Namun demikian, berakhirnya Perang Dingin tersebut bukanlah tanda bahwa perdamaian dunia akan terjamin, sebab ancaman-ancaman lain yang tidak berkaitan dengan Perang Dingin mulai bermunculan. Sebagai contoh yaitu invasi Irak ke Kuwait di awal 1990-an serta pengembangan nuklir oleh Korea Utara yang keduanya sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah penyebaran ideologi seperti ketika berlangsungnya Perang Dingin.²⁷

Jepang yang selama Perang Dingin berlindung di bawah payung aliansi Amerika Serikat, mulai merasa perlu untuk memiliki pertahanannya sendiri. Pemerintah Jepang mulai mendukung pendekatan-pendekatan multilateral dalam rangka keamanan regional.²⁸ Beberapa alasan keamanan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya merupakan salah satu faktor yang membuat Jepang mempertimbangkan kembali perlunya kerjasama dalam bidang keamanan dan

²³ Gerald L. Curtis. *Op. Cit.*, hlm 218-219.

²⁴ *GNPisme* Ikeda merupakan paham yang mementingkan *Gross National Product* atau pendapatan per kapita dalam rangka rencana penggandaan pemasukan. Lih. Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 39.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ CPF Luhulima dkk. *Op. Cit.*, hlm 41.

²⁷ Yoichi Funabashi. *Op. Cit.*, hlm 28.

²⁸ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 160.

stabilitas wilayah dengan pihak lain selain Amerika Serikat.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, di dalam negeri Jepang secara signifikan mulai terjadi perdebatan-perdebatan yang mendorong dilakukannya revisi Pasal 9 Konstitusi 1947. Dengan direvisinya Pasal 9 Konstitusi 1947 tersebut diharapkan bahwa Jepang akan lebih mudah untuk ‘menormalisasi’ kembali negaranya tanpa tersandung oleh larangan institusional.²⁹ Selain itu, Doktrin Yoshida yang selama Perang Dingin menjadi dasar hubungan luar negeri Jepang juga mulai dibelokkan. Dalam tulisannya *The New Global Politics of The Asia-Pacific*, Michael K. Connors menjabarkan beberapa contoh dibelokkannya Doktrin Yoshida oleh Jepang pasca Perang Dingin.

Pada Agustus 1990, Amerika meminta Jepang untuk mengirim bantuan dalam Perang Teluk dan Operasi Penjaga Perdamaian. Pada Oktober 1990, Parlemen Jepang berdebat mengenai pembuatan pasukan penjaga perdamaian diluar Pasukan Bela Diri Jepang dan mengirim bantuan tersebut pada April 1991. Sebagai lanjutan dari hal itu, pada Juni 1992 Parlemen Jepang meratifikasi undang-undang yang berkaitan dengan Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan operasi lain. Undang-undang tersebut memperbolehkan Pasukan Bela Diri Jepang berpartisipasi dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB serta operasi-operasi lain yang berkaitan dengan kemanusiaan.³⁰ Dengan disahkannya undang-undang baru tersebut serta diijinkannya pengiriman Pasukan Bela Diri keluar Jepang, maka Jepang telah menerobos interpretasi undang-undang yang selama ini tidak pernah mengizinkan pengiriman Pasukan Bela Diri keluar Jepang sebagai bagian dari diplomasinya.³¹

Contoh penyimpangan Jepang terhadap Doktrin Yoshida yang lain yaitu bergabungnya Jepang dengan Amerika Serikat dalam *Theatre Missile Defence* dan *Act on Terrorism* serta pembelian perangkat-perangkat baru militer dengan tujuan agar Jepang bisa memainkan peran tidak hanya di dalam negerinya saja, melainkan juga di luar negerinya. Perkembangan yang dilakukan Jepang tersebut sangat bertentangan dengan penolakan Jepang sebelum tahun 1990-an untuk tidak terlibat dengan isu-isu keamanan di dunia internasional selain komitmennya terhadap Perjanjian Kerjasama Keamanan dengan Amerika Serikat.³²

²⁹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 46.

³⁰ Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 232.

³¹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 44.

³² *Ibid.* hlm 46.

2.3. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991

Kondisi dunia internasional merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diprediksi. Banyak faktor yang cenderung tidak berubah, namun hanya butuh satu peristiwa saja untuk mengganti seluruh keadaan. Dengan kata lain, suatu perubahan yang sama sekali tidak pernah diduga maupun yang tidak bisa diduga dapat menyebabkan sebuah perubahan radikal terhadap lingkungan kerjasama internasional. Akhir dari Perang Dingin tahun 1991 merupakan contoh konkrit dari hal tersebut.³³

Perubahan fundamental pun terjadi pada dasar kebijakan luar negeri Jepang pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, Jepang yang pada awalnya tidak ingin terlalu terlibat dengan kerjasama di bidang keamanan, mulai merubah pandangannya pasca berakhirnya Perang Dingin tersebut. Perdebatan-perdebatan mengenai amandemen pasal 9 dan penyimpangan Doktrin Yoshida pun turut mewarnai kondisi dalam negeri Jepang. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijabarkan mengenai beberapa peristiwa serta perubahan yang terjadi di luar dan di dalam negeri Jepang yang menjadi faktor penyebab berubahnya dasar kebijakan luar negeri Jepang.

2.3.1. Faktor Eksternal

Beberapa hal dan peristiwa di luar Jepang sebelum berakhirnya Perang Dingin memiliki peran besar dalam perubahan kebijakan luar negeri Jepang. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain Permintaan *burden-sharing* dari Amerika Serikat, Trauma Jepang terhadap Perang Teluk 1990-1991, Faktor dari Cina dan dua Korea, serta Konflik Laut Cina Selatan.

2.3.1.1. Permintaan *Burden-sharing* dari Amerika Serikat

Amerika Serikat resmi menjadi sekutu Jepang ketika Jepang kalah pada Perang Dunia II dan menandatangani Perjanjian Postdam. Bagi Jepang, keberadaan Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya memiliki arti yang sangat penting. Dalam *Japan's Security Policy in the 1990s*, Akihiko Tanaka menyebutkan beberapa alasan pentingnya aliansi dengan Amerika Serikat bagi Jepang.

³³ Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 148.

Pertama, selain ancaman komunisme dari Uni Soviet, ada ancaman lain yang cukup besar dari wilayah Asia Timur seperti nuklir Korea Utara dan pengembangan militer yang terus dilakukan oleh Cina. Oleh karena itu, aliansi dengan Amerika Serikat akan sangat berguna apabila sewaktu-waktu muncul ancaman di wilayah tersebut. Kedua, aliansi dengan Amerika Serikat sangat berperan bagi Jepang untuk membuktikan kepada sebagian besar negara-negara Asia bahwa Jepang tidak akan menjadi negara militer seperti ketika Perang Dunia II.³⁴

Dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security between The United States and Japan* atau Perjanjian Kerjasama Mutual dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang yang direvisi pada tahun 1960, Jepang sempat berjanji kepada Amerika Serikat bahwa pihaknya akan bekerjasama 'jika dibutuhkan' dengan Amerika Serikat apabila ada ancaman terhadap keamanan Asia.³⁵ Janji Jepang tersebut kemudian benar-benar dimanfaatkan oleh Amerika Serikat beberapa dekade setelahnya dengan diajukannya kerjasama *burden-sharing* atau pembagian tugas kepada Jepang.

Sejak pertengahan 1960-an, Amerika Serikat menghadapi persaingan yang sulit dengan Uni Soviet dalam bidang militer. Amerika Serikat banyak menghabiskan anggarannya untuk memperkuat meriam-meriamnya. Akibatnya, militer Amerika Serikat mulai tidak sanggup untuk menyediakan jaminan keamanan kepada sekutu-sekutu terdekatnya, termasuk Jepang.³⁶ Di sisi lain, kondisi ekonomi Jepang meningkat dan terus mengalami surplus.³⁷ Hal tersebut menyebabkan Amerika Serikat merasa sedikit frustrasi dengan keadaan Jepang yang bisa dengan bebas mengurus ekonominya sambil menikmati payung keamanan yang terus diberikan oleh Amerika Serikat.

Pada awal 1980, Amerika Serikat akhirnya mengajukan suatu pembagian tugas dengan Jepang terkait dengan keamanan dalam negeri Jepang.³⁸ Permintaan Amerika Serikat tersebut ditanggapi Jepang dengan positif. Pada tahun 1981, Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa pihaknya siap melindungi jalur laut Jepang sejauh 1000 mil pelayaran.³⁹

³⁴ *Japan's Security Policy in the 1990s* oleh Akihiko Tanaka dalam Yoichi Funabashi. *Op. Cit.*, hlm 42-43.

³⁵ Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 231.

³⁶ *Japan's Role in Southeast Asian Security : Plus ca change.* Chaiwat Khamchoo. hlm 17.

³⁷ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 39.

³⁸ *Japan's Foreign Policy in the 1990s : From Economic Superpower to what Power?.* Reinhard Drifte. hlm 67.

³⁹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 39.

Pada tahun 1990-an, Amerika Serikat menutup basis militernya di Filipina, mengurangi tentaranya di Korea Selatan dan Jepang, mengurangi program-program latihan militernya dan memangkas bantuan militernya ke Asia Tenggara.⁴⁰ Ketidakstabilan di wilayah Asia ini membuat Jepang harus mengambil langkah untuk melindungi dalam negerinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kato Ryozo, Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat, bahwa dalam kondisi yang demikian, tidak ada pilihan paling baik dan realistis selain mengatur pembagian tugas melalui *burden-sharing* dengan Amerika Serikat.⁴¹

2.3.1.2. Trauma Jepang pasca Perang Teluk 1990-1991

Perang Teluk tahun 1990-1991 menjadi salah satu faktor penyebab Jepang mengubah kebijakan luar negerinya pasca berakhirnya Perang Dingin. Perang yang berlangsung pada 2 Agustus 1990 sampai dengan 28 Februari 1991 ini dimulai dari invasi Irak ke Kuwait. Irak mengklaim bahwa Kuwait telah melebihi kuota dari OPEC sehingga berakibat pada jatuhnya harga minyak dunia dan kerugian bagi ekonomi Irak. Pada krisis teluk ini, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk suatu koalisi yang beranggotakan 34 negara untuk menjalankan operasi perdamaian di wilayah tersebut.⁴²

Dalam Perang Teluk ini, Jepang diminta untuk turut serta dalam pengiriman tentara oleh Amerika Serikat dan dunia internasional, namun Jepang menanggapi dengan ragu-ragu karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah alasan konstitusional. Jepang tidak memiliki pasukan lain yang bisa dikirim keluar negaranya selain Pasukan Bela Diri Jepang, sedangkan konstitusi tidak pernah mengizinkan Pasukan Bela Diri tersebut untuk dikirim keluar Jepang dengan alasan apapun.⁴³ Alasan yang kedua adalah pertimbangan oposisi publik yang dominan terhadap penolakan pengiriman Pasukan Bela Diri keluar wilayah Jepang serta kurangnya asupan dana untuk mengirimkan pasukan tersebut. Alasan yang ketiga adalah rasa khawatir Jepang terhadap sentimen dari pasifik, terutama Cina dan dua Korea terhadap militerisme Jepang apabila Jepang turut mengirimkan pasukannya ke wilayah teluk. Alasan yang terakhir adalah Doktrin Yoshida yang masih berlaku. Apabila Jepang mengirimkan pasukannya, itu berarti bahwa Jepang telah melanggar

⁴⁰ Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 219.

⁴¹ Kato Ryozo. *Op. Cit.*, hlm 24.

⁴² *Gulf War* http://en.wikipedia.org/gulf_war (November 2009)

⁴³ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 44.

Doktrin Yoshida yang selama beberapa dekade terakhir telah menjadi dasar kebijakan luar negerinya.⁴⁴

Setelah mendapatkan permintaan bantuan secara resmi dari Amerika Serikat dan dunia internasional melalui PBB pada Agustus 1990, terjadi perdebatan yang sangat alot dalam parlemen Jepang. Jepang akhirnya baru menanggapi permintaan Amerika Serikat dan PBB tersebut pada April 1991 dengan mengirimkan bantuan sebesar \$13 milyar serta beberapa meriam dan kapal perang.⁴⁵ Namun demikian, bantuan Jepang itu sama sekali tidak mengurangi kekecewaan dunia internasional terhadap sikap Jepang dalam menanggapi Perang Teluk 1990-1991.⁴⁶

Kekecewaan dunia internasional terhadap Jepang tersebut adalah sangat wajar mengingat Jepang memiliki kepentingan yang begitu besar di wilayah Teluk. Sebanyak 95% impor minyak bumi Jepang diambil dari kawasan tersebut. Michael Donnelly merangkum beberapa pendapat mengenai sikap Jepang tersebut dari masyarakat internasional : *“If Japan is to take oil from the Persian Gulf, it is only appropriate that it contributes and contributes fully, to multilateral, UN-sponsored operations there.”*⁴⁷ Dari pernyataan yang dirangkum oleh Donnelly tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat internasional sangat berharap bahwa Jepang dapat berkontribusi secara penuh dalam masalah Perang Teluk 1990-1991.

Tidak hanya dari dunia internasional, kekecewaan yang mendalam juga datang dari Amerika Serikat sebagai sekutu utama Jepang. Pada survei yang dilakukan oleh *Washington Post-ABC* pada 17 Maret 1992, sebanyak 30% warga Amerika Serikat kehilangan rasa hormatnya kepada Jepang karena sikap Jepang yang ragu-ragu selama berlangsungnya Perang Teluk dan hanya 19% saja yang menjawab bertambah hormat kepada Jepang. Selain itu, pasca selesainya Perang Teluk, Amerika Serikat tidak mengundang Menteri Luar Negeri Nakayama ke Washington untuk merayakan kemenangan sekutu, padahal semua sekutu Amerika Serikat termasuk negara-negara Eropa diundang untuk merayakan berakhirnya Perang Teluk tersebut.⁴⁸

⁴⁴ *Tokyo's Policy Responses During the Gulf War and the Impact of the "Iraqi Shock" on Japan.* Courtney Purrington. hlm 167.

⁴⁵ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 44.

⁴⁶ Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 237.

⁴⁷ *Japan and Southeast Asia : Facing an Uncertain Future* oleh Michael Donnelly dan Richard Stubbs dalam *Southeast Asia in the New World Order : Political Economy of a Dynamic Region.* David Wurfel. hlm 30.

⁴⁸ Courtney Purrington. *Op. Cit.*, hlm 169.

Sentimen dari dunia internasional serta pengucilan yang didapat Jepang dari Amerika Serikat pada saat itu sangat membuat pemerintah Jepang trauma dan kehilangan muka. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, akhirnya pada Juni 1992, Parlemen Jepang meloloskan undang-undang *Law Concerning Cooperation for United Nations Peace-keeping Operations and other Operations* yang mengizinkan Pasukan Bela Diri Jepang berpartisipasi dalam misi-misi Penjaga Perdamaian oleh PBB.⁴⁹

Masalah yang dialami Jepang pada Perang Teluk ini merupakan bukti bahwa kebijakan luar negeri Jepang sama sekali bukanlah kebijakan yang dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat apabila Perang Dingin berakhir.⁵⁰ Oleh karena itu, pasca berakhirnya Perang Dingin pada umumnya dan Perang Teluk pada khususnya, Jepang mau tidak mau harus memikirkan kembali kesesuaian kebijakan luar negerinya dengan kondisi baru dunia internasional.

2.3.1.3. Faktor Cina dan Dua Korea : Kebutuhan Jepang terhadap Kepastian Stabilitas Regional pasca Berakhirnya Perang Dingin 1991

Struktur dasar Perang Dingin membuat konflik-konflik serta persaingan lokal tidak terlihat. Dengan berakhirnya Perang Dingin, struktur dasar tersebut pun hilang dan menyisakan satu pertanyaan besar bagi Jepang. Apakah keunggulan Amerika Serikat masih akan cukup kuat untuk mengatur konflik-konflik lokal yang terjadi di Asia Timur atau tidak.⁵¹

Selama Perang Dingin, Jepang berada di bawah perlindungan payung aliansi dengan Amerika Serikat. Hal tersebut menyebabkan Jepang tidak harus menghadapi isu-isu masa lalu, dalam hal ini adalah sentimen-sentimen yang masih tersisa pada Cina, Korea Utara dan Korea Selatan terutama mengenai kekejaman Jepang pada masa Perang Dunia II.⁵² Namun hal tersebut berubah secara signifikan ketika Perang Dingin berakhir. Jepang harus memikirkan kembali hubungannya dengan tiga negara tetangganya tersebut dalam kaitannya dengan kepentingan keamanan dan stabilitas negaranya.⁵³

⁴⁹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 44. Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 238.

⁵⁰ "Japan's Foreign Policy Under Global Uncertainty." Inoguchi Takashi. *International Journal* vol 46, no 2, Autumn 1991 dalam Courtney Purrington. *Op. Cit.*, hlm 168.

⁵¹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 43.

⁵² Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 174.

⁵³ *Japan in 1990 : Limits to Change*. Kent E. Calder. hlm 32.

a. Cina

Bagi para pembuat kebijakan di Jepang, ada satu masalah yang sangat familiar terkait dengan berakhirnya Perang Dingin. Masalah tersebut adalah bagaimana caranya merangkul pusat kekuatan tradisional di Asia yang disebut Cina.⁵⁴ Beberapa hal yang dilakukan Cina dalam tiga dekade ke belakang menjadi salah satu pertimbangan pentingnya Jepang untuk merangkul Cina sebagai mitranya. Pertama, Cina merupakan negara yang secara aktif mendukung pergerakan komunisme di seluruh Asia Tenggara pada era 1960-an sampai 1970-an. Kedua, pasca Perang Dunia II, Cina mengalami bentrokan militer dengan beberapa negara tetangganya, yaitu India (1962), Uni Soviet (1969-1978) dan Vietnam (1979). Ketiga, Cina kembali mengalami bentrokan militer mengenai klaim Laut Cina Selatan dengan Filipina pada tahun 1980-an dan dengan Vietnam pada tahun 1990-an. Keempat, Cina berkolaborasi dengan Burma telah memperluas pengaruh Beijing sampai dengan Teluk Bengal yang terletak di tenggara India dan utara Srilanka serta Laut India yang merupakan jalur vital bagi minyak bumi Jepang.⁵⁵

Jepang secara berangsur-angsur mulai menyadari bahaya Cina baik bagi ekonomi maupun keamanan negaranya. Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi yang dicapai oleh Cina merupakan persaingan secara langsung untuk memperebutkan sumber daya alam dan pasar Asia bagi Jepang.⁵⁶ Sedangkan dari sisi keamanan muncul ancaman antara lain modernisasi militer, pengembangan aktivitas teknologi misil, serta pembangunan misil di sepanjang Selat Taiwan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Cina.⁵⁷ Bagi Jepang, alasan-alasan tersebut menjadikan Cina menjadi saingan potensial (*senzaiteki tekiseikoku*) dan merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Jepang dalam menentukan kebijakan luar negerinya pasca berakhirnya Perang Dingin.⁵⁸

b. Korea Utara

Tidak ada ancaman yang bisa terjadi kapan saja bagi keamanan Jepang selain ancaman dari Korea Utara, terutama mengenai pengembangan nuklir yang secara terang-terangan dilakukan oleh Korea Utara. Pada tahun 1998, Korea Utara mengarahkan percobaan misilnya ke arah Jepang. Lebih lagi, keluarnya Korea Utara

⁵⁴ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 169.

⁵⁵ Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 220-221.

⁵⁶ Reinhard Drifte. *Op. Cit.*, hlm 56.

⁵⁷ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 169.

⁵⁸ *Ibid.* hlm 171.

dari Perjanjian non-Pengembangan Senjata Nuklir di tahun 2003 dan klaimnya terhadap pengembangan senjata nuklir secara signifikan membuat Jepang merasa perlu untuk merubah kebijakan luar negerinya.⁵⁹

c. Korea Selatan

Tidak seperti Cina atau Korea Utara, ancaman yang dihadapi Jepang dari Korea Selatan bukanlah persaingan ekonomi maupun bahaya dalam bidang keamanan, melainkan lebih bersifat protes terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Jepang. Sebagai contoh yaitu protes yang dilayangkan oleh Korea Selatan ketika buku pelajaran yang disusun oleh *Japan's Nationalist Society* untuk perbaikan buku pelajaran sejarah disetujui oleh pemerintah Jepang pada April 2001.

Dalam buku pelajaran tersebut sama sekali tidak dicantumkan bahwa Jepang pernah menduduki Cina pada 1932 dan puluhan ribu wanita Asia dipaksa untuk menjadi pekerja seksual oleh kekuatan imperial Jepang tahun 1930-an sampai 1940-an. Meskipun telah diprotes oleh Korea Selatan, Jepang menolak untuk merevisi buku pelajaran tersebut. Hal ini mengakibatkan Seoul membatalkan latihan militer gabungan bersama Tokyo yang sebelumnya telah direncanakan. Selain itu, Dewan Nasional Korea Selatan juga mengesahkan resolusi yang meminta pemerintahnya untuk memblokir kampanye Jepang untuk kursi di Dewan Keamanan PBB.⁶⁰

2.3.1.4. Konflik Laut Cina Selatan

Sebanyak 90 persen perdagangan internasional dilakukan melalui jalur laut dan 45 persen diantaranya menggunakan perairan Laut Cina Selatan sebagai jalur utama. Selat Malaka yang terletak di Laut Cina Selatan merupakan jalur laut tersibuk nomor dua di dunia setelah Selat Hormuz di kawasan Timur Tengah. Lebih dari 200 pulau-pulau kecil, batu-batuan, serta batu karang yang berada di kepulauan Spratly dan Paracel telah diklaim oleh enam negara Asia, yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.⁶¹

Setelah Perang Dingin berakhir, Jepang menyatakan ketertarikannya terhadap perairan Laut Cina Selatan. Bagi Jepang, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka merupakan jalur yang sangat vital bagi perdagangannya. Kapal-kapal tanker Jepang

⁵⁹ Michael K. Connors. *Op. Cit.*, hlm 43.

⁶⁰ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 163-164.

⁶¹ *The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and The South China Sea Dispute*. Joshua P. Rowan. hlm 415.

yang melewati Laut Cina Selatan membawa lebih dari 70 persen minyak bumi Jepang. Dengan memakai perairan Laut Cina Selatan, Jepang bisa menghindari biaya yang besar serta waktu yang lama dibandingkan dengan menggunakan perairan Indonesia melalui Laut Pasifik. Dari sudut pandang Jepang, kestabilan di Laut Cina Selatan juga sangat mempengaruhi kestabilan di wilayah Asia Tenggara yang merupakan pasar terbesar bagi produk-produk Jepang.⁶²

Melalui Laut Cina Selatan pula, Jepang bisa meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Timur seperti yang dinyatakan oleh Lam Peng Er :

*A Study of Japan's interest and attitude toward the Spratly dispute is also important because the issue may be seen as a litmus test of Japanese foreign policy in the post-Cold War era. Japan aspires to play a leadership role in world affairs, but if it is unwilling or unable to deal actively with the potentially most destabilizing issue in its own backyard, Tokyo will find it difficult to claim the mantle of regional let alone global leadership.*⁶³

Dari kutipan pernyataan Lam Peng Er tersebut, dapat dijelaskan bahwa Jepang ingin memainkan peran yang lebih besar pasca berakhirnya Perang Dingin dalam dunia internasional. Namun demikian, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan apabila dalam lingkup lokal terutama kawasan Asia Timur terlebih dahulu tidak bisa dikuasai oleh Jepang. Laut Cina Selatan bisa menjadi awal yang baik bagi Jepang untuk mulai menyebarkan pengaruh diplomatiknya di kawasan Asia Timur tersebut.⁶⁴

Dalam usahanya untuk menambah pengaruh di kawasan Asia Timur melalui Laut Cina Selatan, Jepang lebih bersikap positif terhadap klaim yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN terhadap perairan tersebut dibandingkan dengan klaim yang dilakukan oleh Cina,⁶⁵ sebagaimana yang telah dinyatakan oleh

⁶² *Ibid.* hlm 431-432.

⁶³ *Japan and the Spratly Dispute : Aspirations and Limitations.* Lam Peng Er. *Asian Survey* 36 : 10 (Oktober 1996). hlm 996.

⁶⁴ Joshua P. Rowan. *Op. Cit.*, hlm 432.

⁶⁵ Pada Februari 1992, Cina mengesahkan undang-undang yang mengklaim kedaulatannya di sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan Pulau Senkaku di Okinawa. Pada April 1992, Deputy Angkatan Laut Cina menegaskan bahwa saat ini adalah saat yang tepat bagi Cina untuk menyesuaikan kembali strategi maritimnya dan lebih mengusahakan perbaikan sumber daya minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Lih. *Japan's Foreign Policy in the 1990 : From Economic Superpower to what power?*. Reinhard Drifte. hlm 58

Nishihara Masashi :

“That sphere of influence notwithstanding, when China was reinforcing its military installations on disputed islands in the South China Sea during the 1990s, ASEAN demanded –and Japan supported the demand– that China act in accordance with established standards of conduct.”⁶⁶

Untuk mendukung usaha negara-negara anggota ASEAN tersebut, Jepang mempergunakan beberapa forum multilateral seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Melalui forum tersebut, Tokyo telah mengusahakan peningkatan citranya di kawasan Asia, terutama Asia Timur.⁶⁷

2.3.2. Faktor Internal

Pada dasarnya, perubahan kebijakan luar negeri Jepang pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar negaranya. Pertimbangan-pertimbangan dalam negeri yang banyak dilakukan oleh Jepang pada awal dekade 1990-an pun merupakan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia internasional pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Sebagai contoh konkrit yaitu, pelebaran fungsi Pasukan Bela Diri yang terjadi karena pengaruh Perang Teluk atau permintaan *burden-sharing* dari Amerika Serikat yang menyebabkan Jepang mulai terlibat dalam dialog-dialog kawasan yang berkaitan dengan kerjasama bidang keamanan.

Besarnya pengaruh kondisi dunia internasional pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 juga disampaikan oleh Tahara Soichiro, seorang penulis dalam bidang politik dan kebijakan luar negeri :

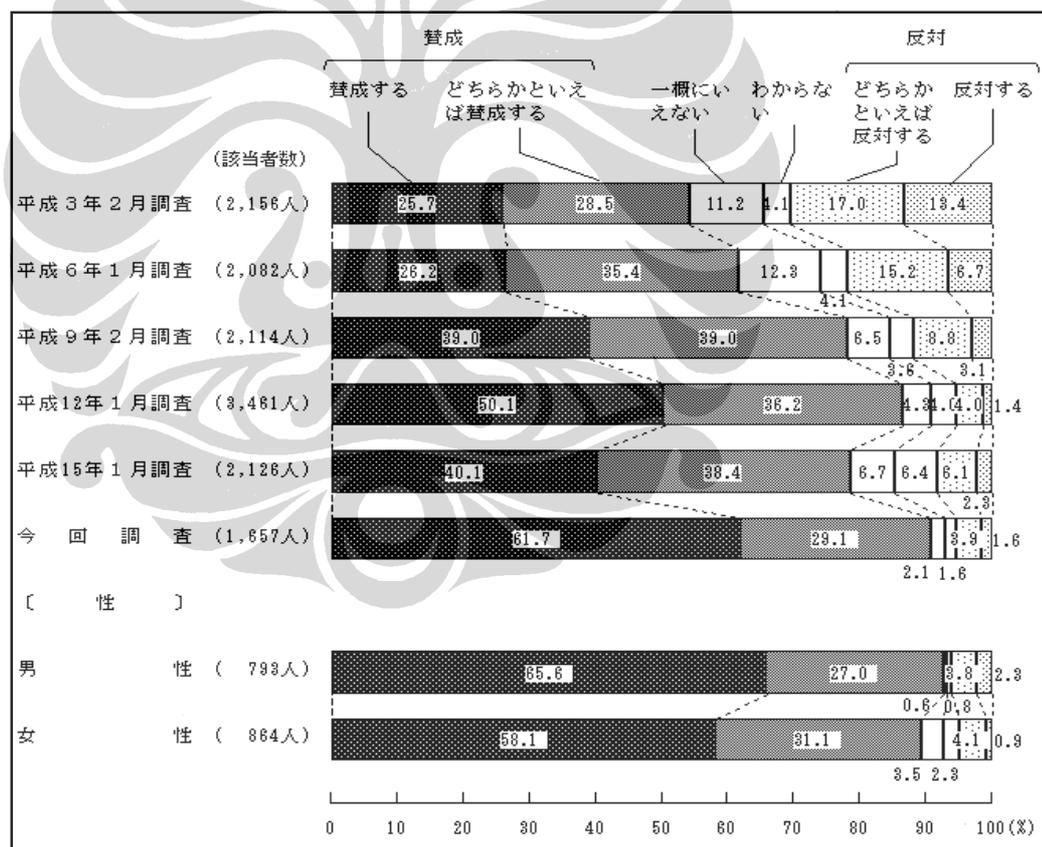
“... The United States needed Japan as an ally in the Cold War, and learned to tolerate us, even though our manufacturing success disrupted the American Economy. But what will become of Japan if the Berlin Wall comes down, and if the Cold War disappears? The answer is obvious. Japan will become unnecessary. Unless Japan develops its own positive, acceptable

⁶⁶ *Japan's Political and Security Relations with ASEAN* oleh Nishihara Masashi dalam Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 156.

⁶⁷ Joshua P. Rowan. *Op. Cit.*, hlm 432.

strategy about what kind of a role it should play in the world... America and many other countries as well will turn more and more against us.”⁶⁸

Melalui pernyataan Tahara tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya ada kekhawatiran yang cukup besar dari dalam negeri Jepang apabila Perang Dingin berakhir. Jepang mempertanyakan posisinya di dunia internasional serta pandangan Amerika Serikat yang mungkin akan berubah terhadap posisi Jepang sebagai sekutunya jika sewaktu-waktu Tembok Berlin sebagai simbol Perang Dingin runtuh. Jika hal tersebut terjadi, Jepang hanya bisa melindungi dalam negerinya dengan mengembangkan peran yang lebih positif di dalam dunia internasional. Didasari oleh kekhawatiran tersebut, pendapat dalam negeri Jepang mulai mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan sejak tahun 1991.



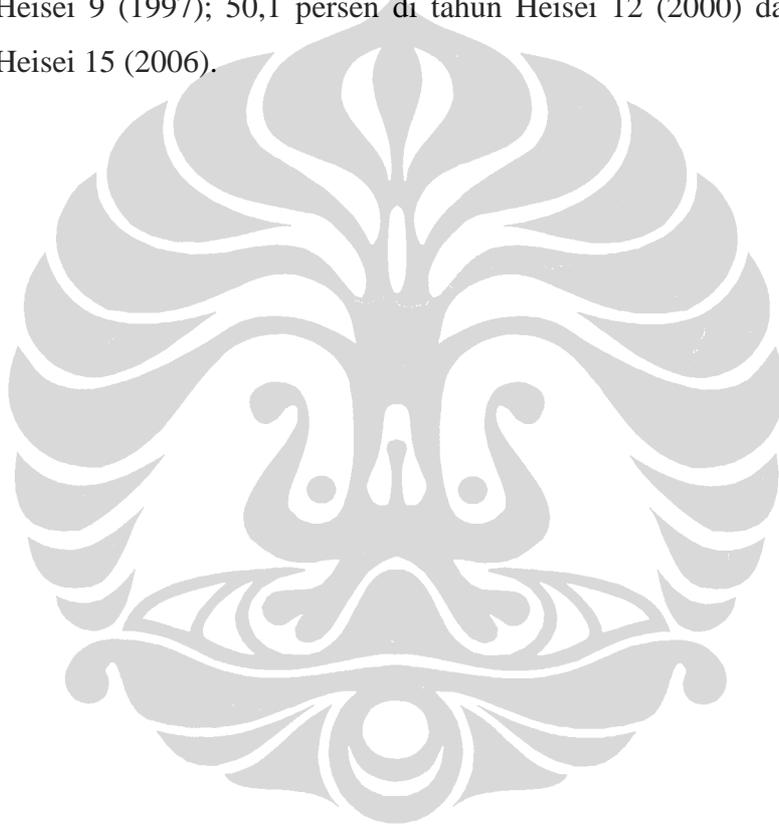
Gambar. Survei Menteri Pertahanan Jepang mengenai Pro dan Kontra dalam negeri Jepang terhadap meningkatnya partisipasi Jepang dalam peran internasional tahun 2006.⁶⁹

⁶⁸ "Nichibei Anpojyouyaku wa ippoutekini Hakisareru." Tahara Soichiro. *Ushio*, Januari 1990.

⁶⁹ *Jieitai-Bouei Mondai ni Kansuru Yoron Chousa*.

<http://www.mod.go.jp/j/library/bouei-mondai/1-index.htm> (Juni 2009)

Survei yang dilaksanakan oleh *Ministry of Defense* Jepang sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan bahwa presentase masyarakat Jepang yang setuju apabila Jepang meningkatkan perannya dalam isu-isu keamanan internasional semakin meningkat. Berdasarkan survei tersebut, dapat dianalisa bahwa pada ^{へいせい}平成 3 (Heisei 3) atau tahun 1991 penanggalan masehi, dari 2.156 orang responden, 25,7 persen diantaranya menyatakan ^{さんせい}賛成 atau setuju apabila Jepang meningkatkan perannya di dunia internasional. Pada tahun-tahun berikutnya, presentase tersebut terus meningkat menjadi 26,2 persen di tahun Heisei 6 (1994); 39,0 persen di tahun Heisei 9 (1997); 50,1 persen di tahun Heisei 12 (2000) dan 61,7 persen di tahun Heisei 15 (2006).



BAB 3

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN PADA MASA PERANG DINGIN DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DINGIN (1973-1993)

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, kebijakan luar negeri Jepang secara umum telah berubah secara signifikan pasca berakhirnya Perang Dingin di tahun 1991. Perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut juga berdampak pada pola kerjasama Jepang dengan organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang telah terjalin selama kurang lebih empat dekade sejak tahun 1970-an. Beberapa contoh seperti perluasan kerjasama serta penambahan agenda kerjasama kedua pihak turut mewarnai perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN tersebut.

Pada pembahasan selanjutnya, akan dijabarkan mengenai kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin serta perubahan yang terjadi ketika Perang Dingin tersebut berakhir di tahun 1991. Namun, sebelum membahas hal tersebut, sebagai gambaran akan diuraikan secara singkat mengenai sejarah hubungan kedua pihak sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 sampai dengan terbentuknya Forum ASEAN-Jepang di tahun 1977.

3.1. Ikhtisar Sejarah Hubungan Jepang-ASEAN

Secara historis, hubungan Jepang dengan Asia Tenggara memiliki sejarah yang kelam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, beberapa negara Asia Tenggara pada tahun 1940-an pernah merasakan masa penjajahan Jepang.¹ Pada kenyataannya, penjajahan tersebut masih meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat Asia Tenggara, tua atau muda, kaum elit maupun non-elit sampai dengan akhir 1980-an.² Hal tersebut merupakan hal yang wajar mengingat hanya dalam kurang lebih 3 tahun masa penjajahan, banyak korban jiwa yang jatuh serta tidak sedikit sumber daya alam negara-negara Asia Tenggara yang telah dieksploitasi oleh Jepang.

Kontak pertama Jepang dengan Asia Tenggara pasca Perang Dunia II baru

¹ Pada tahun 1942, tentara Jepang menyapu seluruh Asia Tenggara, menduduki Hongkong dan delapan negara Asia Tenggara. Hanya Thailand yang tercatat bebas dari pendudukan Jepang pada masa itu. Selain itu, Korea dan Taiwan serta sebagian besar Cina juga telah berada di tangan Jepang. Secara nyata, hampir semua bagian Asia Tenggara dan Asia Timur berada di bawah kendali Jepang dari tahun 1942-1945. Lih. Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 227.

² *Ibid.* hlm 216.

dimulai lagi sekitar tahun 1950-an, namun pada saat itu hubungan keduanya hanya berkisar mengenai masalah pengembalian pampasan perang oleh Jepang.³ Pada masa-masa awal terbentuknya ASEAN di tahun 1967, minat Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara dapat dikatakan tidak terlalu besar. Walaupun telah disampaikan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, bahwa ASEAN akan mempertimbangkan partisipasi serta kerjasama dengan Jepang pada saat dibentuknya ASEAN, namun pada kenyataannya selama bertahun-tahun Jepang tidak terlalu menaruh minat pada kawasan tersebut. Sebagai contoh adalah pidato Perdana Menteri Satou di depan parlemen Jepang pada 5 Desember 1967. Satou jelas-jelas tidak menyebutkan mengenai ASEAN walaupun pada kenyataannya ia baru saja mengadakan kunjungan kenegaraan ke kawasan Asia Tenggara.⁴

Barulah pada tahun 1971 tepat ketika Deklarasi Kuala Lumpur dideklarasikan, Jepang menyampaikan secara resmi pengakuannya terhadap ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional.⁵ Pengakuan Jepang terhadap ASEAN tersebut kemudian kembali diperkuat oleh Jepang dengan dibahasnya ASEAN sebagai organisasi regional utama di Asia Tenggara pada edisi 1972 *Diplomatic Bluebook* Kementerian Luar Negeri Jepang (*Waga Gaikou no Kinkyō*).⁶

Namun demikian, pasca diakuinya ASEAN sebagai organisasi internasional oleh Jepang, bukan berarti bahwa hubungan antara keduanya berjalan tanpa hambatan. Contoh konkrit yang menjadikan hubungan Jepang dan ASEAN menjadi sulit pada awalnya adalah adanya kritik dari negara-negara Asia Tenggara terutama Malaysia di tahun 1973. Kritik yang dilayangkan adalah mengenai kebijakan produksi karet sintesis Jepang yang merugikan produksi karet alam negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini kemudian pada akhirnya membawa Jepang dan Asia Tenggara bertemu dalam suatu dialog formal untuk pertama kalinya dengan nama *Synthetic Rubber Forum* atau Forum Karet Sintesis. Forum inilah yang pada akhirnya akan menjadi cikal bakal Forum ASEAN-Jepang dalam lingkup yang lebih

³ *ASEAN-Japan Relations : The Underpinning of East Asian Peace and Stability* oleh Jusuf Wanandi dalam Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 3.

⁴ *ASEAN and Japan : More than Economics* oleh Alan Rix dalam Alison Broinowski. *Op. Cit.*, hlm 178.

⁵ Deklarasi Kuala Lumpur 1971 merupakan deklarasi yang berisi mengenai pernyataan netralitas negara-negara ASEAN dari suatu paham. Jepang yang pada saat itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan ekonomi, merasa tertarik dengan diumumkannya Deklarasi Kuala Lumpur. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan Jepang bahwa melalui deklarasi tersebut, paham komunisme tidak akan masuk ke wilayah Asia Tenggara dan tidak akan membahayakan stabilitas ekonomi negaranya. Lih Okabe Tatsumi. *Op. Cit.*, hlm 73.

⁶ *ASEAN and Japan : More than Economics*. Alan Rix. hlm 178.

formal.⁷ Sepanjang sejarahnya, sebagai tahap pertama kontak antara Jepang dan ASEAN selaku organisasi regional, Forum Karet Sintesis ini hanya dilaksanakan selama tiga kali.

Pertemuan yang pertama dilaksanakan di Pattaya, Thailand pada April 1973. Pada Forum yang pertama ini, hadir Kementrian Luar Negeri dari enam negara anggota ASEAN dan juga perwakilan dari Kementrian Luar Negeri Jepang. Malaysia, yang memang sejak awal merupakan pelopor dari Forum ini, secara ekstrim mengajukan proposal yang menjelaskan posisinya dalam melawan ekspansi industri karet sintesis Jepang yang tidak pandang bulu. Dalam waktu kurang lebih dua hari masalah karet sintesis tersebut diperbincangkan, namun sayang belum menemukan titik terang. Jepang tetap bersikeras dengan pendiriannya, begitu pula dari pihak ASEAN. Oleh karena itu, kedua pihak setuju untuk diadakan kembali pertemuan serupa dalam waktu dekat untuk kembali menyelesaikan permasalahan mengenai karet sintesis tersebut.⁸

Sebagai lanjutan dari Forum Karet Sintesis yang pertama, pada November 1973 di Tokyo dan Februari 1974 di Kuala Lumpur, kembali diadakan Forum yang kedua dan ketiga. Pada forum yang kedua dan ketiga ini, tidak seperti pada forum pertama, reaksi Jepang terhadap tuntutan negara-negara Asia Tenggara jauh lebih lunak.⁹ Pada pertemuan kedua, Jepang setuju untuk menjamin bahwa produksi karet sintesisnya tidak akan merugikan pasar karet alam negara-negara Asia Tenggara. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, Jepang akhirnya menyetujui untuk memberikan bantuan teknis kepada produksi karet di Thailand dan bantuan sebesar 600 juta yen untuk Malaysia dalam rangka pengembangan industri ban karet.¹⁰

Beberapa ahli menyatakan asumsinya mengenai sebab-sebab melunaknya sikap Jepang terhadap ASEAN tersebut. Dalam bukunya *The International Relations of Japan and Southeast Asia : Forging a New Regionalism*, Sudo menuliskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong Jepang untuk mempertahankan hubungannya dengan Asia Tenggara di awal tahun 1970-an. Salah satunya adalah kepentingan Jepang terhadap komoditi minyak bumi. Di tahun 1973, dunia tengah digoncang dengan krisis global yang mengakibatkan naiknya harga minyak bumi secara

⁷ Alison Broinowski. *Op. Cit.*, hlm 180.

⁸ *The International Relations of Japan and Southeast Asia : Forging a New Regionalism*. Suelo Sudo. hlm 35.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Alan Rix. *Op. Cit.*, hlm 180.

signifikan. Hal tersebut membuat Jepang khawatir, sebab naiknya harga minyak bumi secara otomatis akan berdampak pada industri-industri Jepang, terutama karet sintesisnya. Pada dekade 1970-an, komoditi karet sintesis adalah salah satu komoditi yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh Jepang. Jepang pada saat itu kemudian berusaha untuk menghindari terjadinya friksi dengan negara-negara Asia Tenggara, dalam hal ini terutama dengan Indonesia, mengingat Indonesia ketika itu adalah negara penyuplai minyak bumi terbesar ke Jepang.¹¹

Pendapat lain mengenai pentingnya minyak bumi bagi Jepang juga diungkapkan oleh Hero U. Kuntjoro-Jakti. Menurutnya, krisis minyak yang melanda dunia pada 1973 membuat Jepang merasa perlu untuk mengamankan jalur suplai minyak mentah terutama yang berasal dari Persia ke Jepang.¹² Lebih dari 70 persen minyak yang diimpor Jepang dari Timur Tengah dikirim melalui perairan Asia Tenggara, yaitu melalui Selat Malaka dan Selat Lombok. Menurut suatu penelitian, Jepang bisa menghemat sekitar US\$340 juta dengan mengimpor minyak mentah melalui selat-selat tersebut.¹³ Selain itu, Asia Tenggara memiliki populasi lebih dari lima ratus lima juta penduduk atau sekitar lima kali dari penduduk Jepang. Pasar serta potensi Asia Tenggara bagi barang-barang produksi Jepang merupakan sesuatu yang sangat menarik.¹⁴ Hal inilah yang membuat keberadaan Asia Tenggara serta ASEAN sebagai organisasi regional di dalamnya menjadi hal yang sangat penting bagi Jepang untuk dipertahankan.

Selain kepentingannya terhadap komoditi minyak bumi dan juga perairan Asia Tenggara, perhatian Jepang terhadap Asia Tenggara dan ASEAN juga dipicu oleh beberapa kerusuhan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama di Bangkok dan Jakarta ketika kunjungan Perdana Menteri Tanaka Kakuei pada Januari 1974. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Bangkok dan Jakarta tersebut menyuarakan penolakan terhadap kerjasama kembali dengan Jepang dengan alasan imperialis ekonomi Jepang sebagai bentuk kolonialisme baru.¹⁵ Tahap ini merupakan tahap yang krusial bagi hubungan Jepang dan ASEAN. Dengan adanya

¹¹ *Japan's Asia Policy : Regional Policy and Global Interest*. Wolf Mendl. hlm 100.

¹² *Pertumbuhan Jepang dan setelah menjadi kaya : ke arah "Peran Internasional" yang mana?*. Hero U. Kuntjoro-Jakti. Prisma No. 3 Maret 1981. hlm 47-48.

¹³ *The Straits of Malacca : International Cooperation in Trade Funding and Navigational Safety*. Hamzah Ahmad. hlm 12.

¹⁴ *Japan's Political and Security Relations with ASEAN* oleh Nishihara Masashi dalam Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 156.

¹⁵ *Ibid.* hlm 76.

kerusuhan-kerusuhan tersebut, Jepang dibuat memikirkan ulang mengenai hubungannya dengan Asia Tenggara.¹⁶

Ketertarikan dan kepentingan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara kembali bertambah pada April 1975. Tepat ketika tiga negara Indocina, yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja berubah menjadi komunis, Jepang lantas menyadari peran ASEAN di kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah sistem keamanan dalam rangka membendung pengaruh komunisme.¹⁷ Jepang mengharapkan bahwa ASEAN akan berkontribusi dalam promosi stabilisasi wilayah Asia Tenggara dalam naungan kerjasama yang damai dengan negara-negara Indocina sehingga tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi Jepang.

Beberapa kejadian di Asia Tenggara yang menuntut peran lebih aktif dari Jepang seperti yang telah dipaparkan di atas menyebabkan Jepang, khususnya Perdana Menteri Fukuda, mulai mengambil langkah diplomasi yang lebih aktif di kawasan tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1977, Fukuda menyampaikan tiga poin penting dalam pidatonya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Pidato ini kemudian dikenal sebagai Doktrin Fukuda 1977. Doktrin Fukuda 1977 tersebut dikatakan sebagai sebuah *turning point* atau titik tolak bagi kelanjutan hubungan Jepang dengan ASEAN.¹⁸ Tiga poin Doktrin Fukuda 1977 antara lain sebagai berikut :

1. Jepang menolak peran militer dan memutuskan untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan Asia Tenggara
2. Jepang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan hubungan kepercayaan mutual berdasarkan pengertian *heart to heart*.
3. Jepang akan menjadi mitra yang setara bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya, akan bekerja sama secara positif untuk memelihara hubungan berdasarkan pengertian mutual dengan negara-negara Indocina, dan akan berkontribusi kepada pembangunan perdamaian dan kesejahteraan di seluruh Asia Tenggara.¹⁹

¹⁶ Okabe Tatsumi. *Op. Cit.*, hlm 74.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Daojiong Zha. *Op. Cit.*, hlm 130.

¹⁹ *Ibid.*

3.2. Kebijakan Jepang terhadap ASEAN pada Masa Perang Dingin (1973-1991)

Selama berlangsungnya Perang Dingin 1945-1991, kerjasama serta dialog-dialog yang dilakukan oleh Jepang dan ASEAN sebagian besar didominasi oleh isu-isu ekonomi.²⁰ Hampir tidak ada kerjasama dalam bidang yang berkaitan dengan isu-isu keamanan dan stabilitas wilayah di antara keduanya.

Menurut Sandra R. Leavitt dalam tulisannya yang berjudul *The Lack of Security Cooperation between Southeast Asia and Japan : Yen Yes, Pax Nippon No*, terdapat dua penjelasan umum yang menyebabkan kurangnya kerjasama di bidang keamanan antara Jepang dan ASEAN pada masa Perang Dingin. Pertama, masih ada memori kolektif di antara masyarakat Asia Tenggara itu sendiri akan pendudukan dan kekejaman Jepang yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Kedua, adanya halangan bagi Jepang yang berupa institusi atau perundangan yang berlaku di Jepang.²¹ Di antara perundangan itu antara lain adalah Pasal 9 Konstitusi Meiji 1947 dan Perjanjian Kerjasama Mutual dan Keamanan dengan Amerika Serikat 1960.²²

Selama Perang Dingin, Jepang cenderung menerapkan prinsip *Seikei Bunri* dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. *Seikei Bunri* merupakan prinsip pemisahan ekonomi dari politik, termasuk di dalamnya kerjasama dalam bidang keamanan yang menjadi kunci operasional pemerintah Jepang dalam berinteraksi dengan ASEAN.²³ Bahkan menariknya, Jepang secara tegas menolak kerjasama formal dalam bidang keamanan dan militer dengan ASEAN. Jepang hanya bekerjasama dalam bidang keamanan jika hal tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi negaranya dan bukan bantuan militer secara langsung.²⁴

Hal tersebut dibuktikan dari beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Perdana Menteri Jepang selama Perang Dingin serta kerjasama-kerjasama nyata yang dilakukan oleh kedua pihak melalui Forum ASEAN-Jepang.

3.2.1. Kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Jepang terhadap ASEAN pada Masa Perang Dingin (1973-1991)

Selama berlangsungnya Perang Dingin, tercatat ada empat orang Perdana

²⁰ Daojiong Zha. *Op. Cit.*, hlm 132 dan *ASEAN's Political and Security Relations with Japan* oleh Mohamed Jawhar bin Hassan dalam Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 146

²¹ Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 217.

²² *Ibid.* hlm 223-224.

²³ Daojiong Zha. *Op. Cit.*, hlm 84

²⁴ Chaiwat Khamchoo. *Op. Cit.*, hlm 12-13

Menteri Jepang yang berperan dalam peningkatan hubungan dengan ASEAN. Keempat Perdana Menteri tersebut antara lain Fukuda Takeo, Suzuki Zenko, Nakasone Yasuhiro dan Takeshita Noboru. Dalam rangka meningkatkan kerjasama Jepang dengan ASEAN, para Perdana Menteri tersebut pada umumnya melakukan kunjungan kenegaraan ke negara-negara anggota ASEAN.²⁵

a. Fukuda Takeo (24 Desember 1976 – 7 Desember 1978)

Fukuda Takeo melakukan kunjungan kenegaraannya ke wilayah Asia Tenggara pada bulan Agustus 1977. Seperti yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, dalam kunjungannya ini, Fukuda menyampaikan tiga poin doktrinnya yang menjadi tonggak penting hubungan Jepang dengan ASEAN. Tidak hanya itu saja, dalam kunjungannya tersebut, Fukuda juga melembagakan dana bantuan untuk sektor kultural serta menandatangani beberapa proyek industri.²⁶

b. Suzuki Zenko (17 Juli 1980 – 27 November 1982)

Perdana Menteri Suzuki Zenko melakukan kunjungan ke negara-negara ASEAN pada Januari 1981. Tujuan utama diadakannya kunjungan kenegaraan oleh Suzuki adalah untuk membangun pemikiran bersama dan kebersamaan dalam kerjasama dengan ASEAN. Dalam kunjungannya, Perdana Menteri Suzuki melembagakan beberapa badan seperti *Human Resource Centre*, *Trade-Investment Tourism Centre* serta mempromosikan program studi regional.²⁷

Selain itu, dalam pidato utamanya di Bangkok, ada beberapa poin penting yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Suzuki, antara lain :

1. Jepang tidak akan memainkan peranan militer dalam komunitas internasional
2. Jepang akan memainkan peranan politik untuk membantu pelestarian perdamaian dunia, setaraf dengan status Jepang di antara komunitas negara-negara di dunia
3. Jepang akan menekankan empat area dalam kebijakan kerjasama ekonominya antara lain pengembangan wilayah pedalaman dan promosi pertanian, pengembangan sumber daya energi, pengembangan sumber daya manusia, serta promosi usaha kecil dan menengah.

²⁵ Sueo Sudo. *Op. Cit.*, hlm 42.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Pidato Suzuki tersebut bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci Doktrin Fukuda yang telah disampaikan oleh pendahulunya tersebut lima tahun sebelumnya.²⁸ Dapat dilihat bahwa dalam pidato Suzuki tersebut, Jepang sangat menekankan penolakannya terhadap peran militer internasional dan lebih mementingkan pengembangan sektor-sektor komersial.

c. Nakasone Yasuhiro (27 November 1982 – 6 November 1987)

Dua tahun setelah kunjungan Suzuki, pada April-Mei 1983, Jepang melalui Perdana Menteri Nakasone kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke kawasan Asia Tenggara. Tujuan utama kunjungan Nakasone adalah untuk membangun kerjasama serta hubungan yang lebih dalam dan lebih kokoh antara Jepang dan ASEAN.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Kuala Lumpur, Nakasone menyampaikan proposal yang terkait dengan kerjasama bidang industri dan budaya. Inti dari proposal tersebut antara lain :

1. Peningkatan lima puluh persen dalam lingkup kuota produk industri ASEAN dimulai dari tahun 1984
2. Pengaktifan kembali program bantuan Jepang bagi perbaikan peralatan dan perlengkapan industri perusahaan-perusahaan ASEAN
3. Undangan untuk 150 pemuda-pemudi ASEAN untuk mengunjungi Jepang tiap tahunnya dalam rangka *short stay* dan peluncuran kerjasama IPTEK ASEAN-Jepang²⁹

d. Takeshita Noboru (6 November 1987 – 3 Juni 1989)

Dalam kunjungannya ke negara-negara ASEAN pada tahun 1989, Perdana Menteri Takeshita, selayaknya para pendahulunya juga menyampaikan pidato utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hubungan Jepang dengan ASEAN. Dalam pidatonya, Takeshita menyatakan bahwa ikatan berdasarkan hubungan “*heart to heart*” yang disampaikan oleh Fukuda dalam doktrinnya kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, masih terus akan menjadi landasan dasar kebijakan Jepang *vis-à-vis*

²⁸ *From Fukuda to Takeshita : A Decade of Japan-ASEAN Relations* oleh Sueo Sudo dalam *Japan and South East Asia vol 2*. Wolf Mendl. hlm 170-171.

²⁹ *Ibid.* hlm 171.

terhadap ASEAN.³⁰

Selain menegaskan kembali dasar “*heart to heart*” tersebut, poin penting lain yang disampaikan Takeshita adalah sebagai berikut :

1. Jepang akan menguatkan daya pulih ASEAN
2. Jepang akan mempromosikan koordinasi politik antara Jepang dan ASEAN
3. Jepang akan mempromosikan pertukaran budaya

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang terhadap ASEAN melalui Perdana Menteriya hampir semuanya didominasi oleh sektor-sektor komersial seperti ekonomi dan perdagangan maupun pertukaran kebudayaan.

3.2.2. Forum ASEAN-Jepang Pertama sampai ke-12

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Forum ASEAN-Jepang yang sampai dengan masa kontemporer ini rutin dilaksanakan oleh ASEAN dan Jepang pada awalnya hanyalah forum non-formal yang bertujuan membicarakan masalah perdagangan karet sintesis.³¹ Pada Maret 1977 di Manila, Jepang setuju untuk mengakhiri secara resmi Forum Karet Sintesis dengan dibentuknya forum baru yang dinamakan Forum ASEAN-Jepang.

Dalam *Nihon-ASEAN Foramu : Keizai to Gaikou*, Takehiko Nakayama menyebutkan bahwa ada tiga tujuan utama pembentukan Forum ASEAN-Jepang di tahun 1977, antara lain :

1. Untuk memudahkan formulasi mengenai keputusan-keputusan dalam jangkauan kerjasama antara ASEAN dan Jepang,
2. Untuk mempermudah pemeriksaan ulang dan pengawasan dalam kerja sama keduanya, serta,
3. Untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang sekiranya akan

³⁰ Sueo Sudo. *Op. Cit.*, hlm 38.

³¹ *From Fukuda to Takeshita : A Decade of Japan-ASEAN Relations* oleh Sueo Sudo dalam *Japan and Southeast Asia volume 2*. Wolf Mendl. hlm 174.

mencapai tujuan berupa pengembangan kerjasama.³²

Perlu diketahui bahwa sampai dengan Forum Jepang ASEAN yang ke-12 pada tahun 1990 di Tokyo, agenda kerjasama Jepang dan ASEAN hanya berkisar mengenai hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi serta pertukaran budaya. Jepang dan ASEAN sendiri secara tegas tidak pernah memasukkan agenda mengenai bidang keamanan dan stabilitas wilayah.³³ Untuk membuktikan hal tersebut, pada penjelasan berikutnya akan dijabarkan mengenai hal-hal apa saja yang dibicarakan dalam Forum ASEAN-Jepang yang pertama sampai dengan yang ke-12 yang merupakan Forum ASEAN-Jepang yang dilaksanakan selama berlangsungnya Perang Dingin.

a. Forum ASEAN-Jepang Pertama³⁴

Forum ASEAN-Jepang pertama diselenggarakan pada 23 Maret 1977 di Jakarta. Forum ASEAN-Jepang yang pertama ini sekaligus menjadi tonggak diakhirinya Forum Karet Sintesis dan menjadi forum diskusi formal yang pertama antara Jepang dan ASEAN.

Dalam diskusi pertama ini, ASEAN dan Jepang sepakat untuk meninjau kembali, memantau dan merekomendasikan undang-undang guna menguatkan dan mengembangkan kerjasama khususnya dalam bidang pengembangan industri, perdagangan serta makanan dan pertanian. Selain itu, Jepang menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung secara penuh ASEAN dalam rangka pemulihan ekonomi regional serta membantu percepatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

b. Forum ASEAN-Jepang kedua sampai dengan keempat

Menurut sumber yang didapat dari *ASEAN Document Series 1967-1988* yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN, tidak ada catatan maupun rekaman mengenai Forum ASEAN-Jepang yang kedua sampai dengan yang keempat.³⁵ Hal tersebut juga dipertegas dalam situs resmi ASEAN bahwa tidak ada dokumen resmi yang dikeluarkan terkait dengan Forum ASEAN-Jepang yang kedua sampai dengan yang keempat.³⁶

³² *Nihon-ASEAN Foramu : Keizai to Gaikou*. Takehiko Nishiyama. hlm 36-40.

³³ Alison Browinowski. *Op. Cit.*, hlm 169.

³⁴ *ASEAN Document Series 1967-1988 third edition*. hlm 534.

³⁵ *Ibid.* hlm 22.

³⁶ *ASEAN-Japan Forum*. <http://www.aseansec.org/5763.htm> (Desember 2009)

c. Forum ASEAN-Jepang kelima³⁷

Forum ASEAN-Jepang yang kelima diselenggarakan pada 28-30 Januari 1982 di Jakarta. Selama kurang lebih tiga hari pelaksanaan, diskusi banyak didominasi oleh sektor-sektor komersial seperti bidang perdagangan dan komoditas, investasi, ekonomi, kerjasama keuangan dan teknis perkapalan. Diskusi juga menyinggung sedikit mengenai masalah kerjasama kebudayaan.

Dalam Forum ini, pihak Jepang setuju untuk mempertimbangkan dan mengeksplor kemungkinan pemberian bantuan terhadap bidang-bidang penghematan energi yang telah diminta oleh ASEAN sebelumnya. Selain itu, dikatakan oleh ASEAN bahwa pihaknya akan mempertimbangkan proposal "*Plan for ASEAN Regional Studies Promotion Programme*" yang diajukan oleh Jepang.

d. Forum ASEAN-Jepang keenam³⁸

Forum ASEAN-Jepang yang keenam dilaksanakan di Tokyo, 26-29 Mei 1983. Dalam forum ini dibicarakan beberapa bidang kerjasama antara lain, perdagangan dan komoditas, investasi, ekonomi dan kerjasama teknis, kerjasama kebudayaan serta kerjasama dalam bidang IPTEK. Selain itu, ASEAN dan Jepang juga menyetujui untuk mengeksplorasi kemungkinan lebih jauh promosi kerjasama dalam bidang pengembangan pertanian serta pengembangan energi.

e. Forum ASEAN-Jepang ketujuh³⁹

Forum ASEAN-Jepang yang ketujuh dilaksanakan di Bali pada tanggal 4-6 Oktober 1984. Diskusi dalam forum yang ketujuh ini membicarakan mengenai beberapa bidang-bidang kerjasama antara lain, perdagangan dan komoditas, investasi, industri, keuangan, ekonomi, sosial, serta kerjasama teknis dan kebudayaan. Selain itu, dalam kesempatan kali ini juga dilakukan penyerahan proposal baru dalam bidang pertanian, IPTEK dan pengembangan area sosial oleh ASEAN kepada Jepang.

f. Forum ASEAN-Jepang kedelapan⁴⁰

Forum ASEAN-Jepang yang kedelapan diselenggarakan pada tanggal 23-24 Juli 1986 di Tokyo. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini, dibahas mengenai beberapa masalah dan bidang kerjasama antara lain situasi ekonomi internasional, perdagangan dan komoditas utama, investasi, ekonomi dan budaya.

³⁷ *Ibid.* hlm 535-536.

³⁸ *Ibid.* hlm 537-538.

³⁹ *Ibid.* hlm 539-540.

⁴⁰ *Ibid.* hlm 541-542.

Selain itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan aliran investasi Jepang ke ASEAN dan ekspor ASEAN ke Jepang, mendorong wisatawan dari Jepang ke negara-negara ASEAN dan mengembangkan kembali kerjasama dalam bidang IPTEK.

g. Forum ASEAN-Jepang kesembilan⁴¹

Forum ASEAN-Jepang yang kesembilan diadakan di Melaka, Malaysia pada tanggal 22-23 Juli 1987. Pertemuan kali ini membahas bidang-bidang kerjasama seperti isu-isu spesifik dalam bidang perdagangan dan komoditas utama, investasi dan kerjasama industri, “*The New Round of Multilateral Trade Negotiation*”, kerjasama ekonomi, budaya serta IPTEK. Selain itu, pertemuan juga memperbaharui *Agreement on ASEAN Promotion Centre (APC)* untuk periode Mei 1987 sampai dengan Mei 1992.

h. Forum ASEAN-Jepang kesepuluh⁴²

Forum ASEAN-Jepang yang kesepuluh ini diselenggarakan tanggal 21-22 September di Tokyo. Dalam forum kali ini, dibicarakan mengenai tema-tema yang berkaitan dengan keuntungan mutual seperti *Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, perdagangan dan komoditas, investasi dan kerjasama industrial serta kerjasama dan pengembangan kebudayaan.

Dalam rapat kali ini juga dilakukan peluncuran *ASEAN-Japan Development Fund (AJDF)* dan *the Japan-ASEAN Comprehensive Exchange Programme (JACEP)*. Selain itu, dilakukan penyambutan kebijakan ekonomi baru Jepang dalam rangka menciptakan iklim yang nyaman dalam dunia perdagangan, menyediakan akses pasar serta memainkan peran yang lebih aktif dalam pertumbuhan wilayah Asia-Pasifik.

i. Forum ASEAN-Jepang ke-11⁴³

Forum ASEAN-Jepang yang ke-11 diadakan di Manila pada tanggal 3-4 Oktober 1989. Forum ASEAN-Jepang yang kesebelas ini kembali membicarakan mengenai isu-isu khusus dalam ekonomi internasional dengan fokus perhatian kepada *Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Selain itu, hal lain yang juga turut mendapat perhatian adalah isu-isu dalam bidang perdagangan, komoditas, investasi, industri, dan keuangan.

⁴¹ *Ibid.* hlm 543-544.

⁴² *ASEAN Document Series 1988-1989 supplementary edition.* hlm 89-90.

⁴³ *ASEAN Document Series 1989-1991 supplementary edition.* hlm 65-67.

Dalam pertemuan kali ini, ASEAN juga mengharapkan bahwa Jepang dan ASEAN bisa bekerja bersama dalam pengembangan kerjasama ekonomi regional serta mengembangkan kebutuhan ASEAN dalam bidang teknologi.

j. Forum ASEAN-Jepang ke-12⁴⁴

Forum ASEAN-Jepang ke-12 dilaksanakan pada 19-20 September 1990 di Tokyo. Pertemuan menitikberatkan pembicaraan mengenai bidang-bidang kerjasama antara lain *Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, perdagangan dan komoditas, investasi dan kerjasama industrial serta pengembangan kerjasama budaya.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan dan stabilitas wilayah yang dibicarakan oleh Jepang dan ASEAN selama berlangsungnya Forum ASEAN-Jepang yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kerjasama dan topik pembicaraan hanya didominasi oleh bidang-bidang yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, investasi, IPTEK, budaya serta pendidikan.

3.3. Kebijakan Jepang terhadap ASEAN setelah Berakhirnya Perang Dingin 1991

Pasca berakhirnya Perang Dingin 1991, terdapat perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kerjasama Jepang dengan ASEAN. Materi-materi yang berkaitan dengan penambahan agenda kerjasama dalam bidang keamanan dan stabilitas wilayah menjadi salah satu perubahan yang sangat jelas terlihat. Perubahan lingkup kerjasama tersebut diawali dari pengajuan Proposal atau Inisiatif Nakayama oleh Jepang pada tahun 1991 sampai dengan terwujudnya institusi keamanan regional dalam lingkup multilateral pada tahun 1994 yang dinamakan *ASEAN Regional Forum* (ARF).

3.3.1. Proposal Nakayama 1991

Pada pertemuan tingkat Kementrian Luar Negeri atau *ASEAN Post Ministerial Conference* (ASEAN-PMC) di Kuala Lumpur pada 22 Juli 1991, Jepang melalui Menteri Luar Negerinya, Nakayama Taro mengajukan suatu inisiatif baru terhadap ASEAN yang dikenal dengan nama Proposal Nakayama atau Inisiatif

⁴⁴ *Ibid.* hlm 68-69.

Nakayama 1991. Secara garis besar, isi dari Proposal Nakayama ini adalah mengenai pengajuan suatu kerjasama baru terhadap ASEAN yang terkait dengan bidang keamanan dan stabilitas wilayah.⁴⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the Problem of Regional Order*, Amitav Acharya menyatakan bahwa pada dasarnya Proposal Nakayama merupakan suatu inisiatif yang dibuat langsung pada saat ASEAN-PMC itu sendiri dilaksanakan. Melalui inisiatif tersebut, Jepang menyatakan keinginannya untuk membangun suatu forum diskusi baru untuk membicarakan keamanan regional dalam lingkup multilateral.⁴⁶ Secara tegas, berbicara dalam forum tersebut, Nakayama menyampaikan bahwa ASEAN-PMC bisa digunakan sebagai wadah formal untuk suatu proses diskusi politik yang dirancang untuk meningkatkan rasa aman diantara Jepang dan negara-negara anggota ASEAN.⁴⁷

ASEAN pada saat itu menanggapi Inisiatif Menteri Luar Negeri Nakayama ini dengan sikap yang acuh tak acuh serta cenderung menolak ide tersebut.⁴⁸ Namun demikian, menurut Peter Katzenstein dan Okawara Nobuo, usaha Sang Menteri tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang penting dalam kebijakan di bidang keamanan baik di wilayah Asia Tenggara maupun di Jepang itu sendiri untuk waktu ke depannya.⁴⁹

Pertama, Proposal Nakayama telah memberikan modal politis dalam mendorong inisiatif keamanan multilateral kepada Perdana Menteri Miyazawa di awal tahun 1990-an. Hal ini termasuk keikutsertaan Jepang ketika mengirim tentaranya ke Kamboja tahun 1992 dalam Operasi Perdamaian PBB.⁵⁰ Selain itu, adalah hal yang signifikan karena Proposal atau Inisiatif Nakayama juga telah mendorong ASEAN secara tidak langsung untuk mengembangkan rencana dalam membangun dialog keamanan multilateralnya sendiri. Rencana ini pada akhirnya terlaksana dengan berubahnya sikap acuh tak acuh ASEAN terhadap inisiatif Jepang tersebut pada Agustus 1993. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan ASEAN

⁴⁵ "Japan's Evolving Multilateralism" <http://www.aasianst.org/absts/1997abst/japan/j162.htm> (Juli 2009)

⁴⁶ *Japan's Leadership Role in East Asian Security : The Nakayama Proposal and The Logic of Reassurance*. Paul Midford. hlm 382.

⁴⁷ Michael Vatikiotis. *Op. Cit.*

⁴⁸ Reinhard Drifte. *Op. Cit.*, hlm 80.

⁴⁹ *Japan and Asian-Pacific Security : Regionalization, Entrenched Bilateralism and Incipient Multilateralism*. Peter J. Katzenstein dan Nobuo Okawara. hlm 165-194.

⁵⁰ Katzenstein dan Okawara. *Op. Cit.*, hlm 173-176.

Regional Forum (ARF) oleh ASEAN bersama dengan tujuh negara mitra dialognya. Sidang pertama ARF kemudian dilaksanakan pada tahun 1994 di Bangkok.⁵¹

Proposal Nakayama dapat dikatakan merupakan suatu wacana kerjasama keamanan yang dilemparkan pertama kali oleh Jepang dalam suatu forum kepada ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin. Proposal Nakayama secara langsung memang gagal terwujud, namun seperti yang dikatakan oleh Midford, dampak yang ditimbulkan dari pengajuan proposal ini pada akhirnya sangat besar dalam pengembangan institusi keamanan dan dialog mengenai stabilitas wilayah di kawasan Asia Pasifik pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya.

3.3.2. Forum ASEAN-Jepang ke-13⁵²

Forum ASEAN-Jepang yang ke-13 dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 1993 di Tokyo, Jepang. Dalam forum ini, Jepang diwakili oleh Matsuura Koichi, Deputy Kementerian Luar Negeri Jepang, sedangkan dari pihak ASEAN diwakili oleh Peter Chan Jer Hing, Menteri Luar Negeri Singapura.

Dalam pidato pembukanya, Matsuura menyampaikan bahwa ada beberapa agenda rutin yang akan dibicarakan antara lain seperti isu-isu dalam ekonomi internasional, ekonomi bilateral serta pengembangan kerjasama budaya. Selain itu, Matsuura juga menegaskan bahwa forum kali ini merupakan titik perubahan dari forum-forum yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut karena untuk kali pertama, dimasukkan agenda yang terkait dengan bidang politik regional serta isu-isu keamanan dan stabilitas wilayah pada Forum ASEAN-Jepang yang ke-13 tersebut. Hal inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita dalam sub-bab ini.

Garis besar pembicaraan mengenai bidang politik regional dan isu-isu keamanan antara Jepang dan ASEAN terbagi dalam beberapa poin utama, antara lain:

1. Isu-isu keamanan serta dialog keamanan di wilayah Asia-Pasifik. Pada poin ini, baik Jepang maupun ASEAN sepakat untuk mengevaluasi situasi regional. Selain itu, kedua pihak juga menekankan perlunya dialog politik dan keamanan dalam rangka meningkatkan rasa saling pengertian antar negara.

⁵¹ Paul Midford. *Op. Cit.*, hlm 387 dan *ASEAN's Political and Security Relations with Japan* oleh Nishihara Masashi dalam Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 158. Reinhard Drifte. *Op. Cit.*, hlm 81.

⁵² *ASEAN Document Series 1992-1994 Supplementary Edition*. ASEAN Secretariat. hlm 80-81.

2. Situasi di Asia Timur. Jepang mendukung sepenuhnya deklarasi Laut Cina Selatan oleh ASEAN.
3. Masalah Kamboja. Jepang dan ASEAN mendukung sepenuhnya proses perdamaian di Kamboja berdasarkan Perjanjian Paris.
4. Peran Jepang dalam wilayah Asia. Jepang menyatakan niatnya untuk mengembangkan kontribusinya dalam keamanan regional di wilayah Asia. Jepang juga menegaskan bahwa negaranya tidak akan menjadi negara militer lagi seperti dahulu kala. ASEAN kemudian menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan keinginan Jepang untuk berkontribusi dalam masalah keamanan regional tersebut.

Seperti yang telah disebutkan, berbeda dengan Forum ASEAN-Jepang yang sebelumnya, Forum ASEAN-Jepang yang ketigabelas ini mengangkat isu-isu keamanan sebagai salah satu agenda pembicaraannya. Hal ini merupakan kali pertama agenda tersebut dibicarakan oleh ASEAN dan Jepang secara resmi dalam suatu forum sejak dilaksanakannya Forum ASEAN-Jepang yang pertama pada tahun 1977.

3.3.1. ASEAN Regional Forum 1993

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan satu-satunya institusi keamanan multilateral yang ada di wilayah Asia Pasifik. ARF didirikan pada Agustus 1993 oleh enam negara anggota ASEAN yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapura dan Thailand ditambah dengan enam mitra dialog ASEAN yaitu, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Korea Selatan dan Uni Eropa. Tujuan dibentuknya ARF itu sendiri adalah sebagai wadah konsultasi dan diskusi antara negara-negara anggota mengenai masalah-masalah politik regional dan isu-isu keamanan.⁵³

Mengapa ARF digolongkan sebagai salah satu indikator perubahan kebijakan Jepang terhadap ASEAN pasca berakhirnya Perang Dingin? Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan mengenai Proposal Nakayama di subbab sebelumnya, terbentuknya ARF tidaklah lepas dari peran aktif Jepang yang senantiasa mendorong dan meyakinkan ASEAN sebagai pendiri forum ini. Menurut Sandra R. Leavitt,

⁵³ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 162.

Jepang merupakan negara pertama yang sejak tahun 1991 berperan secara langsung dalam proses pematangan ARF.⁵⁴

Jepang merupakan negara yang secara konstitusi menolak adanya kepemilikan militer. Pada masa Perang Dingin, Jepang bahkan dengan tegas menolak pengembangan institusi keamanan di wilayah Asia Tenggara.⁵⁵ Namun, pandangan Jepang tersebut berubah secara signifikan pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991. Jepang lantas merasa perlu untuk mengembangkan suatu forum keamanan multilateral di wilayah Asia Tenggara dan hal tersebut terwujud dalam ARF.⁵⁶

Ada beberapa alasan Jepang bersikeras memelopori lahirnya ARF pasca berakhirnya Perang Dingin. Sebagai negara industri, kestabilan wilayah merupakan hal yang sangat penting bagi ekonomi Jepang. Pasca berakhirnya Perang Dingin, tidak ada lagi kepastian mengenai keamanan Asia Pasifik di masa depan. Seperti yang sudah disampaikan di bab sebelumnya, ancaman nuklir dari Korea Utara, perselisihan Laut Cina Selatan serta munculnya regionalisasi ekonomi Cina kapanpun siap menjadi bahaya bagi stabilitas ekonomi Jepang.⁵⁷ Untuk menjaga stabilitas tersebut, yang dibutuhkan oleh Jepang adalah sebuah institusi keamanan multilateral agar Jepang bisa membicarakan masalah keamanan regional dengan negara-negara lain.

Namun demikian, Jepang tidak bisa mewujudkan hal tersebut karena jika itu dilakukan secara terang-terangan oleh Jepang, akan timbul kecurigaan dari negara-negara tetangga Jepang seperti dua Korea, Cina serta Taiwan yang masih menyimpan kenangan buruk akan kekejaman Jepang di Perang Dunia II.⁵⁸ Jepang juga tahu bahwa Cina akan curiga dan terprovokasi apabila Jepang memimpin pendirian institusi keamanan regional multilateral.⁵⁹ Oleh karena itu, untuk mengurangi kecurigaan-kecurigaan tersebut, sejak tahun 1991 Jepang konsisten mendorong ASEAN untuk membentuk suatu dialog regional yang berkaitan dengan masalah keamanan dan stabilitas wilayah melalui ARF.⁶⁰

⁵⁴ Sandra R. Leavitt. *Op. Cit.*, hlm 226.

⁵⁵ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 160.

⁵⁶ *ASEAN and ARF : The Limits of "ASEAN Way"*. Shaun Narine. hlm 963.

⁵⁷ Yoichi Funabashi. *Op. Cit.*, hlm 28.

⁵⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Han Sung Joo, mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, "Masalah mengenai Jerman kurang lebih sudah terselesaikan. Tapi di Asia, Jepang masih menjadi tetangga yang sulit untuk dimaafkan". Lih *Shrine visit and Textbook Weigh on Koizumi's Future*. Howard W. French. hlm A3.

⁵⁹ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 166.

⁶⁰ Berbeda dengan dua Korea, Cina, maupun Taiwan, Asia Tenggara cenderung bersikap lebih lunak mengenai kenangan kekejaman Jepang di masa lalu. Sejak awal tahun 1990an, kritik wilayah ini terhadap

Menurut Satoh Yukio dalam tulisannya *Emerging Trends in Asia Pacific Security : The Role of Japan*, dialog keamanan multilateral seperti ARF akan mengurangi kecurigaan terhadap Jepang. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Soeya Yoshihide, Profesor Ilmu Politik dari Universitas Keio Tokyo, bahwa kecurigaan terhadap Jepang akan dapat dikurangi melalui suatu dialog multilateral. Ia juga mengatakan bahwa apabila Jepang ingin memainkan peran yang lebih aktif dalam jenjang internasional pasca berakhirnya Perang Dingin, hal tersebut hanya bisa diwujudkan dalam suatu kerangka institusi multilateral.⁶¹

Beberapa sumber lain juga menyebutkan pentingnya ARF bagi Jepang. Pertama adalah faktor Cina. Sejak tahun 1990-an, Cina telah muncul sebagai aktor yang asertif di dalam integrasi ekonomi Asia Timur. Bagi Jepang, ARF adalah suatu kendaraan untuk memikat Cina dan mencegah munculnya ‘ancaman Cina’ yang sebenarnya.⁶² Kedua, Jepang juga menjadikan ARF sebagai institusi dalam perselisihan mengenai Laut Cina Selatan.⁶³ ARF merupakan salah satu faktor hampir tidak adanya perselisihan atau perang di wilayah Asia Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Hal tersebut merupakan prestasi yang cukup signifikan bagi ARF jika melihat banyaknya perselisihan-perselisihan yang terjadi di wilayah lain seperti Afrika dan Eropa pasca Perang Dingin.⁶⁴ Dengan adanya ARF, Jepang bisa sedikit bernafas lega mengenai masalah stabilitas wilayah sekaligus stabilitas ekonominya.

Jepang cenderung mengalami penurunan. Lih *Japan's Political and Security Relations with ASEAN* oleh Nishihara Masashi dalam Pamela J. Noda. *Op. Cit.*, hlm 155 dan Glenn D. Hook. *Op. Cit.*, hlm 187.

⁶¹ Lisa J. Sansoucy. *Op. Cit.*, hlm 166-167.

⁶² Daojiang Zha. *Op. Cit.*, hlm 103.

⁶³ Joshua P. Rowan. *Op. Cit.*, hlm 432.

⁶⁴ Sandra R. Leavitt. hlm 226.

BAB 4

KESIMPULAN

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945 menyebabkan Jepang jatuh ke tangan sekutu. Pendudukan sekutu di Jepang berlangsung sejak tahun 1945 sampai dengan 1951. Sebagai akibat dari pendudukan sekutu, Jepang mengalami demiliterisasi atau pengurangan fungsi militer. Jepang tidak lagi diizinkan untuk melakukan pengiriman militer keluar negaranya. Demiliterisasi Jepang tersebut diperkuat dengan disusunnya Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 1947 pada tahun 1946. Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947 tersebut menyatakan bahwa Jepang tidak mengakui perang serta penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik internasional.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, melalui demiliterisasi, sekutu tidak mengizinkan adanya kepemilikan militer kembali oleh Jepang. Namun demikian, tidak dengan masalah ekonomi. Melalui Deklarasi Postdam yang ditandatanganinya dengan sekutu, Jepang diizinkan untuk melakukan perbaikan ekonomi dalam negerinya. Jepang dapat dengan tenang melaksanakan perbaikan ekonomi dalam negerinya sebab ada suatu perjanjian yang disebut dengan *Security Treaty between The United States and Japan* atau Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 1951 dan direvisi ulang pada tahun 1960. Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang tersebut memberikan keamanan secara militer kepada Jepang selama negara tersebut melakukan perbaikan ekonomi dalam negerinya.

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan pengejawantahan kebijakan dalam negeri dari negara terkait baik yang murni dibuat karena masalah domestik, maupun yang dibuat karena ada pengaruh dari dunia internasional. Kebijakan dalam negeri Jepang pasca kekealahannya dalam Perang Dunia II diarahkan untuk pembangunan ekonomi dalam negerinya. Hal tersebut ditegaskan melalui Doktrin Yoshida yang dideklarasikan di awal Perang Dingin oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru. Doktrin Yoshida menyatakan bahwa rehabilitasi ekonomi adalah tujuan nasional utama bagi Jepang. Melalui Doktrin Yoshida tersebut, Jepang juga menyampaikan penolakannya terhadap partisipasi atau kerjasama kolektif yang berkaitan dengan masalah militer dan keamanan. Doktrin Yoshida merupakan dasar kebijakan luar negeri Jepang yang dipakai selama lebih dari empat puluh tahun sejak awal Perang Dingin pada tahun 1947.

Kebijakan luar negeri Jepang yang didasari oleh Doktrin Yoshida juga diterapkan pada hubungannya dengan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Hubungan Jepang-ASEAN dimulai pada tahun 1973 dengan dilaksanakannya *Synthetic Rubber Forum* atau Forum Karet Sintesis. Sejak tahun 1973 tersebut, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diberlakukan Jepang terhadap ASEAN cenderung menghindari kerjasama yang berkaitan dengan isu keamanan dan lebih memfokuskan pada bidang ekonomi serta budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Jepang terhadap ASEAN yang banyak menekankan demiliterisasi Jepang. Sebagai contoh yaitu pidato dari Perdana Menteri Suzuki Zenko pada Januari 1981 di Bangkok. Dalam pidatonya, Suzuki menyampaikan bahwa Jepang tidak akan memainkan peran dalam militer di dunia internasional. Kedua, Forum ASEAN-Jepang yang pertama pada tahun 1977 sampai dengan yang ke-12 tahun 1990. Pada Forum ASEAN-Jepang yang pertama sampai dengan yang ke-12 tersebut, fokus kerjasama keduanya adalah pada bidang ekonomi, perdagangan serta budaya.

Namun demikian, Jepang mengubah kebijakan luar negerinya setelah Perang Dingin berakhir di tahun 1991. Kebijakan luar negeri Jepang tidak lagi memfokuskan tujuannya pada bidang ekonomi saja, melainkan juga pada bidang keamanan dan militer. Sebagai contoh konkrit adalah pengesahan undang-undang yang mengizinkan pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang atau *Self Defense Force* (SDF) ke luar Jepang dalam kerangka perdamaian internasional. Pengesahan tersebut merupakan penerobosan interpretasi undang-undang yang selama ini tidak pernah mengizinkan Pasukan Bela Diri dikirim ke luar Jepang sebagai suatu bentuk diplomasi. Pasca disahkannya undang-undang tersebut, Jepang banyak melakukan pengiriman tentaranya ke daerah-daerah konflik seperti Timor Leste, Kamboja, Mozambik dan Dataran Tinggi Golan.

Perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, terutama faktor dari luar negeri Jepang. Pertama, adanya permintaan *burden-sharing* dari Amerika Serikat. Kedua, trauma Jepang terhadap Perang Teluk tahun 1990-1991. Faktor yang ketiga, adanya ancaman yang semakin nyata dari Cina dan dua Korea yang menyebabkan Jepang haus akan kepastian stabilitas regional pasca berakhirnya Perang Dingin 1991. Faktor yang terakhir adalah meruncingnya konflik Laut Cina Selatan yang berpengaruh pada kondisi ekonomi Jepang.

Perubahan kebijakan luar negeri Jepang secara umum tersebut juga diikuti dengan perubahan kebijakan luar negerinya terhadap ASEAN. Hal tersebut ditandai dengan beberapa hal. Pertama adalah pengajuan Proposal Nakayama tahun 1991 oleh pihak Jepang. Proposal Nakayama merupakan proposal yang berisi mengenai ajakan kerjasama baru dalam bidang keamanan dan stabilitas wilayah yang diajukan Jepang kepada ASEAN. Kedua adalah penambahan agenda dalam bidang keamanan pada Forum ASEAN-Jepang yang ke-13 tahun 1993. Ketiga adalah partisipasi Jepang dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang merupakan sebuah wadah dialog multilateral mengenai masalah keamanan dan stabilitas wilayah di kawasan Asia Pasifik. Pengajuan Proposal Nakayama, penambahan agenda bidang keamanan pada Forum ASEAN-Jepang serta partisipasi Jepang dalam ARF tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Doktrin Yoshida yang menyatakan penolakan Jepang terhadap partisipasi atau kerjasama kolektif terkait dengan masalah militer dan keamanan.

Berakhirnya Perang Dingin di awal tahun 1990-an merupakan salah satu contoh perubahan kondisi dunia internasional yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Berakhirnya Perang Dingin tersebut juga turut menyebabkan berakhirnya sistem bipolarisasi yang mendominasi pola hubungan internasional selama kurang lebih lima dekade. Di sisi lain, kebijakan luar negeri Jepang yang mulai diterapkan sejak masa pendudukan sekutu bukanlah sesuatu yang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan kondisi dunia internasional yang terjadi secara tiba-tiba seperti berakhirnya Perang Dingin tersebut. Hal itu menyebabkan Jepang harus merubah interpretasi terhadap kebijakan luar negeri yang dianutnya di awal tahun 1990-an yang juga turut mempengaruhi pola kerjasama Jepang dengan organisasi regional kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Ahmad, Hamzah. *The Straits of Malacca : International Cooperation in Trade Funding and Navigational Safety*. Kuala Lumpur : Pelanduk Publication, 1997.
- ASEAN Secretariat. *ASEAN Document Series 1967-1988 third edition*. Jakarta : ASEAN Sec., 1988.
- . *ASEAN Document Series 1988-1989 supplementary edition*. Jakarta : ASEAN Sec., 1989.
- . *ASEAN Document Series 1989-1991 supplementary edition*. Jakarta : ASEAN Sec., 1991.
- . *ASEAN Document Series 1992-1994 supplementary edition*. Jakarta : ASEAN Sec., 1994.
- Broinowski, Alison, ed. *Understanding ASEAN*. London : The Macmillan Press LTD, 1982.
- Connors, Michael K. *The New Global Politics of The Asia-Pacific*. New York : Routledge, 2004.
- Curtis L., Gerald, ed. *Japan's Foreign Policy after The Cold War – Coping with change*. New York : An East Gate Book, 1993.
- . *The United States, Japan and Asia : Challenges for U.S. Policy*. London : W.W. Norton & Company. 1994.
- Drifte, Reinhard. *Japan's Foreign Policy*. London : Routledge, 1990.
- . *Japan's Foreign Policy in the 1990's : From Economic Superpower to What Power?*. London : Macmillan Press LTD, 1996.
- Funabashi, Yoichi, ed. *Japan's International Agenda*. New York : New York University Press, 1994.
- Hatano, Sumio, and Itou, Shin. *Gendai Nihon Tounan Ajia Gaikou Seisaku 1950-2005*. Tokyo : Waseda Daigaku Shuppanbu, 2007.
- Hasegawa, Yuuichi, ed. *Gendai no Kokusai Seiji : Reisengo no Nihon Gaikou wo Kangaeru Shikaku*. Kyoto : Minerva Text Library, 1998.
- Hook D., Glenn, et al., ed. *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*. New York : Sheffield Centre for Japanese Studies, 2001.
- Luhulima, CPF. *Seperempat Abad ASEAN*. Jakarta : Sekretariat Nasional ASEAN

Departemen Luar Negeri, 1994.

Mendl, Wolf, ed. *Japan and Southeast Asia volume 2*. London : Routledge 2001.

----- . *Japan`s Asia Policy : Regional Policy and Global Interest*. London : Routledge Press, 1995.

Midford, Paul. *Japan's Leadership Role in East Asian Security Multilateralism: The Nakayama Proposal and The Logic of Reassurance*. Routledge Press 2000.

Noda J., Pamela, ed. *ASEAN-Japan Cooperation : A Foundation for East Asian Community*. Tokyo : Japan Center for International Exchange (JCIE), 2003.

Okabe, Tatsumi, ed. *Twenty Years of ASEAN : Its Survival and Development*. Tokyo : The Japan Institute of International Affairs, 1988.

Pyle B., Kenneth. *Japan Rising : The Resurgence of Japanese Power and Purpose*. New York : Public Affairs TM, 2007.

Rajendra, M. *Asean`s Foreign Relation, The Shift to Collection Action*. Arenabuku sdn. bhd. Press, 1985.

Sekretariat Nasional ASEAN. *Asean-Selayang Pandang 1992*. Jakarta : Sek. Nas. ASEAN, 1992.

Sudo, Sueo. *Evolution of ASEAN - Japan Relations*. Institute of Southeast Asian Studies, 2005.

----- . *Southeast Asia in Japanese Security Policy*. Singapore, 1991.

----- . *The Fukuda Doctrine and ASEAN : New Dimensions in Japanese Foreign Policy*. Institute of Southeast Studies, 1992.

----- . *The International Relations of Japan and Southeast Asia : Forging a New Regionalism*. London : Routledge Press, 2002.

U.S. Department of State. *Occupation of Japan : Policy and Progress*. New York : Greenwood Press, 1969.

Wurfel, David, and Burton, Bruce. *Southeast Asia in the New World Order : Political Economy of a Dynamic Region*. London : St. Martin Press, 1996.

Zha, Daojiong, and Hu, Weixing. *Building Neighborly Community*. Manchester : Manchester University Press, 2006.

JURNAL

Calder, E., Kent. "Japan in 1990 : Limits to Change". *Asian Survey*, Vol. 31, No. 1, A Survey of Asia in 1990 : Part 1 (Jan., 1991) : 21-35.

- Er, Lam Peng. "Japan and the Spratlys Dispute : Aspirations and Limitations". *Asian Survey* 36 : 10 (Oktober 1996) : 996.
- Katzenstein J. Peter, and Okawara, Nobuo. "Japan and Asian-Pacific Security : Regionalization, Entrenched Bilateralism and Incipient Multilateralism". *Pacific Review* 14 pt. 2 (2001) : 165-194.
- Khamchoo, Chaiwat. "Japan's Role in Southeast Asian Security : Plus ca change". *Pacific Affairs*, Vol. 64, No. 1 (Spring, 1991) : 7-22.
- Kuntjoro-Jakti, U., Heru. "Pertumbuhan Jepang dan setelah menjadi kaya : ke arah "Peran Internasional" yang mana?". *Prisma* No. 3 (Maret 1981) : 39-53.
- Leavitt R., Sandra. "The Lack of Security Cooperation between Southeast Asia and Japan : Yen Yes, Pax Nippon No". *Asian Survey*, Vol. 45, No. 2 (Mar.-Apr., 2005) : 216-240.
- Narine, Shaun. "ASEAN and ARF : The Limits of "ASEAN Way"". *Asian Survey* Vol. 37, No. 10 (Okt., 1997) : 961-978.
- Okazaki, Katsuo. "Japan's Foreign Relations". *Annals of The American Academy of Political and Social Science*, Vol. 308, Japan since Recovery of Independence (Nov., 1956) : 156-166.
- Purrington, Courtney. "Tokyo's Policy Responses During the Gulf War and the Impact of the "Iraqi Shock" on Japan". *Pacific Affairs*, Vol 65, No 2 (Summer 1992) : 161-181.
- Rowan, P., Joshua. "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and The South China Sea Dispute". *Asian Survey*, Vol. 45, No. 3 (Mei-Jun., 2005) : 414-436.
- Soichiro, Tahara. "Nichibei Anpojoyouyaku wa ippoutekini Hakisareru". *Ushio* (Januari 1990).
- Vatikiotis, Michael. "The New Player". *Far Eastern Economic Review* (Agustus, 1 1991).

ARTIKEL MAJALAH DAN SURAT KABAR

- French W., Howard. "Shrine visit and Textbook Weigh on Koizumi's Future." *New York Times* (10 Agustus 2001).
- Ryozo, Kato. "Change and Post-Cold War Japanese Security : Alliance vs. Community of Shared Destiny." *Gaikou Forum English Edition* Winter Vol. 2 No. 1. 2002 : 21-28.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

Article 9 of the Japanese Constitution (n.d.) Desember, 28 2008. 13:20.
http://en.wikipedia.org/wiki/Article_9_of_the_Japanese_Constitution

ASEAN-Japan Forum (n.d) Desember, 14 2009. 19:10.
<http://www.aseansec.org/5763.htm>

Foreign Relations of Japan (n.d.) Desember, 28 2008. 13:25.
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Japan

Gulf War (n.d.) November, 17 2009. 16:16. http://en.wikipedia.org/gulf_war

Japan's Evolving Multilateralism (n.d.) Juli, 1 2009. 16:04.
<http://www.aasianst.org/absts/1997abst/japan/j162.htm>

Jieitai-Bouei Mondai ni Kansuru Yoron Chousa. (n.d.) Juni, 26 2009. 11:20.
<http://www.mod.go.jp/j/library/bouei-mondai/1-index.htm>

Sansoucy J., Lisa. *Japan's Regional Security Policy in Post-Cold War Asia.*
September, 3 2009. 16:05.
http://www.wepapers.com/Papers/67249/Japan%27s_Regional_Security_Policy_In_Post-Cold_War_Asia

Treaty of San Fransisco (n.d.) Juni, 26 2009. 11:43
http://en.wikipedia.org/wiki/treaty_of_san_fransisco

Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947

いち にほんこくみん せいぎ ちつじょ きちょう こくさいへいわ せいじつ ききゅう
一 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

こっけん はつどう せんそう ぶりよく いかくまた ぶりよく こうし こくさいふんそう
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争

かいけつ しゅだん えいきゅう ほうき
を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

に ぜんこう もくてき たつ りくかいこうぐん た せんりょく ほじ
二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持

くに こうせんけん みと
しない。国の交戦権は、これを認めない。

1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang 1951

SECURITY TREATY BETWEEN THE UNITED STATES AND JAPAN

8 September, 1951

Japan has this day signed a Treaty of Peace with the Allied Powers. On the coming into force of that Treaty, Japan will not have the effective means to exercise its inherent right of self-defense because it has been disarmed. There is danger to Japan in this situation because irresponsible militarism has not yet been driven from the world. Therefore, Japan desires a Security Treaty with the United States of America to come into force simultaneously with the Treaty of Peace between the United States of America and Japan. The Treaty of Peace recognizes that Japan as a sovereign nation has the right to enter into collective security arrangements, and further, the Charter of the United Nations recognizes that all nations possess an inherent right of individual and collective self-defense.

In exercise of these rights, Japan desires, as a provisional arrangement for its defense, that the United States of America should maintain armed forces of its own in and about Japan so as to deter attack upon Japan.

The United States of America, in the interest of peace and security, is presently willing to maintain certain of its armed forces in and about Japan, in the expectation, however, that Japan will itself increasingly assume responsibility for its own defense against direct and indirect aggression, always avoiding any armament which could be an offensive threat or serve other than to promote peace and security in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter.

Accordingly, the two countries have agreed as follows:

Article I Japan grants, and the United States of America accepts the right, upon the coming into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land, air, and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of the international peace and security in the Far East and to the security of Japan against attack from without, including assistance given at the express request of the Japanese Government to put down large-scale internal riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside Power or Powers.

Article II During the exercise of the right referred to in Article I, Japan will not grant, without the prior consent of the United States of America, any bases or any rights, power, or authority whatsoever, in or relating to bases or the right of garrison or of maneuver, or transit of ground, air, or naval forces to any third Power.

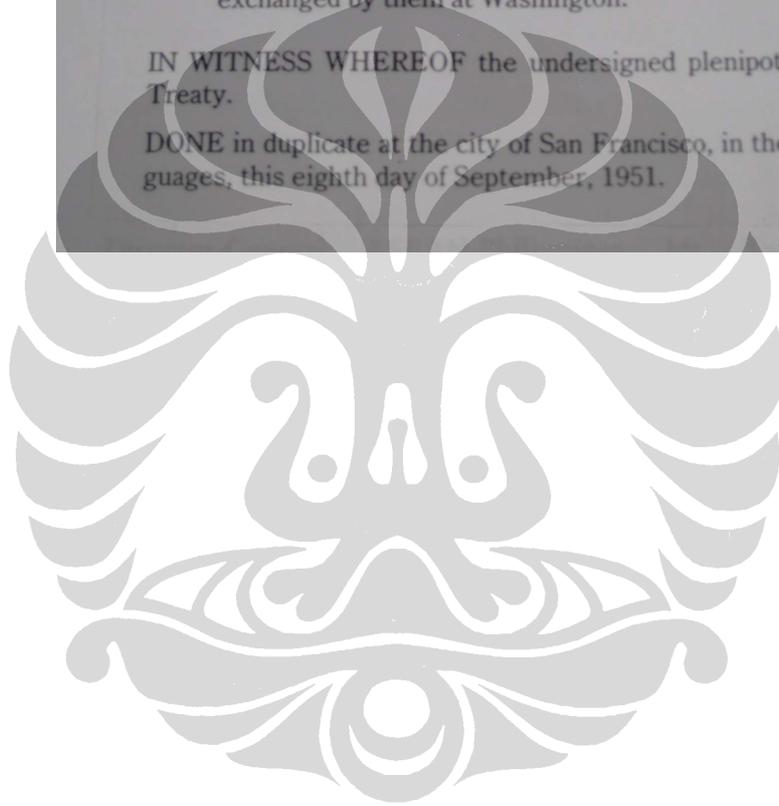
Article III The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between the two Governments.

Article IV This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of the United States of America and of Japan there shall have come into force such United Nations arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of international peace and security in the Japan Area.

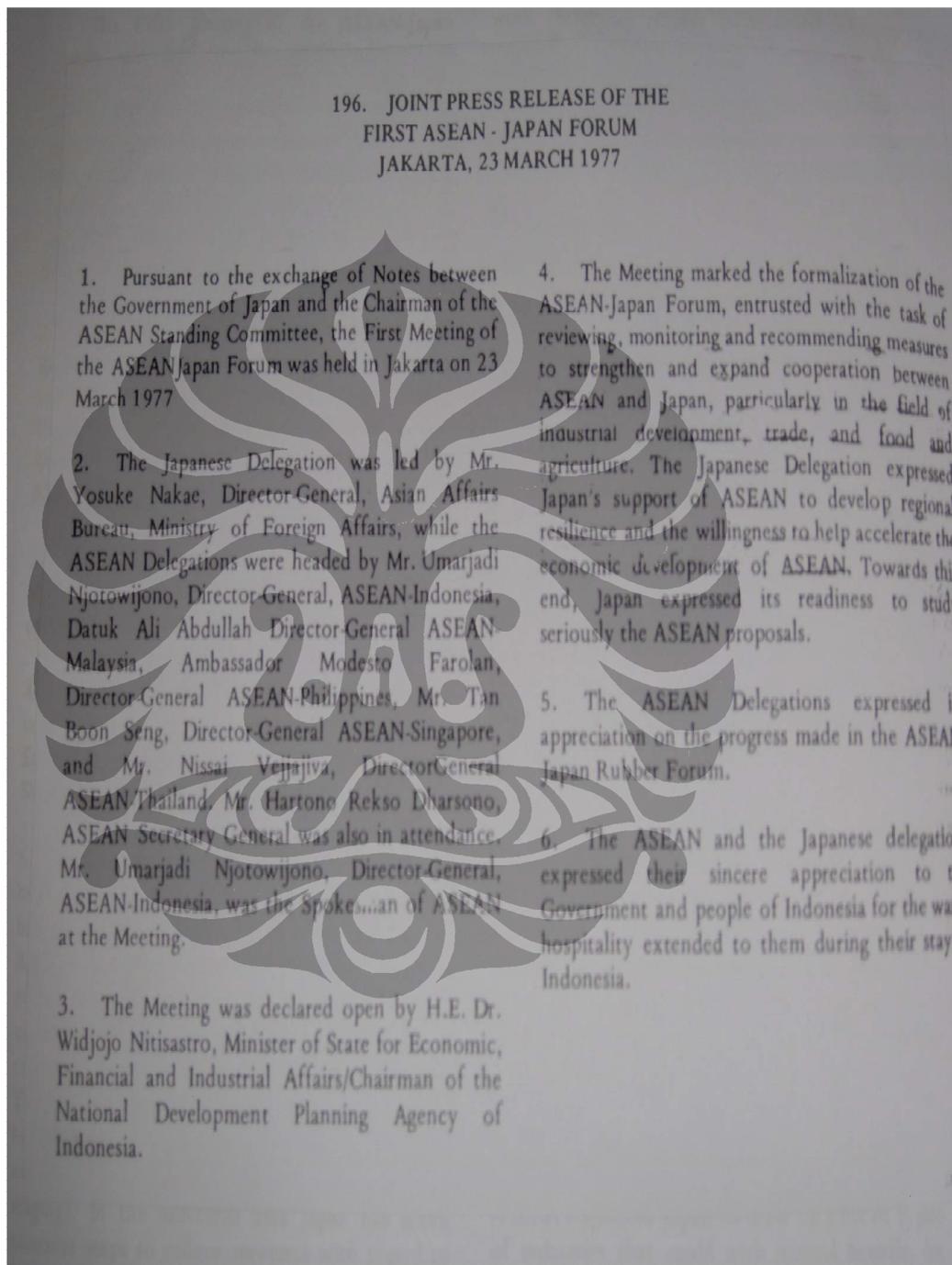
Article V This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Washington.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries have signed this Treaty.

DONE in duplicate at the city of San Francisco, in the English and Japanese languages, this eighth day of September, 1951.



Joint Press Release Forum ASEAN-Jepang pertama sampai ke-13



197. JOINT PRESS RELEASE OF THE
FIFTH ASEAN - JAPAN FORUM
JAKARTA, 28 - 30 JANUARY 1982

1. The Fifth Meeting of the ASEAN-Japan Forum was held at the ASEAN Secretariat Building, Jakarta, on 28-30 January 1982. The Meeting was attended by Delegates from Japan and the ASEAN member countries, as well as the Chairmen and Representatives of ASEAN COTAC, COIME, COFAB, COFAB, COTT, COCI, COSD and COST. The Secretary General of the ASEAN Secretariat and his staff were also present.
2. The Japanese Delegation was led by Mr. Kazutoshi Hasegawa, Deputy Director General, Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs. The Leader of the Indonesian Delegation, Mr. Atmono Suryo, acted as Spokesman for the ASEAN Delegation.
3. The Meeting was officially opened by H.E. Mr. Radius Prawiro, Minister of Trade and Cooperatives of the Republic of Indonesia.
4. The Meeting discussed cooperation activities in the fields of Trade and Commodity, Investment, Economic, Financial and Technical Cooperation, Shipping and Cultural Cooperation.
5. Trade between ASEAN and Japan has increased over recent years with the export of manufactured products trebling in the last decade. ASEAN, however, pointed out that only about 7% of her total exports to Japan are in the form of manufactured products, and the bulk of ASEAN export to Japan comprise raw materials and fuel. The Meeting noted that Japan in pursuance of the MTN Agreement had decided to reduce tariff rates on 1653 items (two years ahead of the scheduled staging). In the non-tariff area Japan has taken concrete steps to reduce measures with regard to inspection procedures and standards by the end of January 1982. Japan will also be organising a seminar this year on Japan's Generalised System of Preferences and the related Cumulative Rules of Origin for the benefit of ASEAN manufactures and exporters.
6. In the spirit of International Cooperation such as that emanating from the Cancun Summit on North-South issues, ASEAN and Japan would work closely at various international fora to positively deal with such issues.
7. The Meeting stressed the urgent need to sign and ratify the 6th ITA before the deadline of April 30, 1982. Concerning the international Natural Rubber Agreement (INRA), both sides, reassuring the importance of the definitive entry into force of the Agreement, agreed that Japan and the ASEAN countries would further cooperate to this end. In particular the Meeting agreed to urge all producing and consuming countries to fully participate in the INRA.
8. ASEAN considered that, the issue of improved commodity based compensatory financing arrangements including the eventual establishment of a globalized STABEX type facility was an important area for ASEAN-Japan cooperation. While closely watching the study on a complementary facility to compensate shortfall in export earnings being made by UNCTAD Secretariat, both sides agreed on the desirability of further studies on the matter.
9. In order to accelerate the flow of Japanese investment into the ASEAN region, the Meeting agreed to fully utilise the facilities of the ASEAN Promotion Center on Trade, Investment and Tourism in Tokyo. The Meeting also agreed that feasibility studies on specific projects and facilitation of joint ventures on small and medium scale industries could be dealt with by the Centre.
10. The possibility of re-deployment of industries from Japan was also discussed during the Meeting. ASEAN requested Japan to draw up a list of types of industries that could with mutual benefit, be re-deployed to the ASEAN region.
11. The Meeting noted that energy is one of the top priority areas where Japan will continue to support ASEAN and in connection with the ASEAN proposals the Japanese side agreed to consider and explore possibilities for supporting the requests assistance for training courses and seminars in more specific areas such as energy conservation.

12. The Meeting noted that the preparations for implementing the ASEAN projects on Human Resources Development were proceeding satisfactorily. It was also agreed that the implementation of the project should be pursued vigorously by the parties concerned. It also reiterated an earlier agreement that the member countries may start implementations of the projects independent of each other.

13. The Meeting was informed by ASEAN on the latest development of the implementation of the ASEAN Cultural Fund, Japan Scholarships for ASEAN Youth, and Regional Studies Promotion Programme. The Meeting noted that the Fund had been very instrumental to present ASEAN cultural activities which involved the mass participation of the ASEAN people.

14. The Meeting welcomed the Japanese proposal entitled "Plan for ASEAN Regional Studies Promotion Programme" and was informed by ASEAN that in preparation for cooperation with Japan on the Programme a symposium will be hosted by Malaysia to consider the project in details. It was also agreed that the ASEAN Regional Studies Promotion Programme is a joint ASEAN-Japan project.

15. The Meeting recognized the importance of the ASEAN proposed projects on shipping which will contribute to the realisation of ASEAN's aspiration to develop, strengthen and promote the shipping

industries of the region with a view to attaining self reliance in shipping as well as in shipbuilding industry in the ASEAN region. Japan would give high consideration to assist ASEAN, where possible, for early implementation of the projects.

16. The Meeting noted the suggestion brought up by the Indonesian Minister of Trade and Cooperatives at the official opening of the Fifth Meeting of the Forum, for a second meeting of Economic Ministers of ASEAN and Japan, and agreed to explore the possibilities of holding such a meeting.

17. The Meeting agreed that with the purpose of having closer contacts in between Forum Meetings, the ASEAN Tokyo Committee (ATC) should be utilized to follow up the discussions of the Forum and make preparations of the next Meeting of the Forum.

18. The Sixth Meeting of the ASEAN-Japan Forum will be held in Japan at a date to be mutually agreed upon.

19. The Delegations of Japan, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand expressed their sincere appreciation to the Government of the Republic of Indonesia in particular to the ASEAN National Secretariat of Indonesia, and the ASEAN Secretariat for the warm hospitality accorded them and for the excellent arrangements made for the Meeting.

198. JOINT COMMUNIQUE OF THE
SIXTH ASEAN - JAPAN FORUM
TOKYO, 26 - 29 MAY 1983

1. The Sixth Meeting of the Japan - ASEAN Forum was held at the Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, on 26 - 27 May, 1983. The Meeting was attended by Delegates from Japan and the ASEAN member countries. The Secretary General of the ASEAN Secretariat was also present.
2. The Japanese Delegation was led by Mr. Hiroshi Hashimoto, Director General of the Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs. The leader of the Indonesian Delegation, Mr. Adiwoso Abubakar acted as Spokesman for the ASEAN Delegations.
3. The Meeting was officially opened by His Excellency, Mr. Yozo Ishikawa, Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan.
4. The Meeting discussed a wide range of subjects on cooperation activities in the field of Trade and Commodity, Investment, Economic and Technical Cooperation Cultural Cooperation and Cooperation on Science and Technology.
5. The Japanese side explained the current economic situation of Japan and the ASEAN side stated that the period of the oil crises which brought severe economic recession to most of the industrialized countries had also adversely affected the economies of the ASEAN member countries.
6. The Meeting expressed satisfaction that total trade between Japan and ASEAN has increased more than twice during the last five years making ASEAN Japan's second largest trading partner after the United States. ASEAN, however, pointed out that less than six percent of her total exports to Japan are in the form of manufactured products and that the bulk of ASEAN exports to Japan continue to comprise mainly raw materials and fuel. In that connection the ASEAN side requested Japan to make every possible effort to take further market-opening measures for ASEAN products including the tariff reduction, improvement of the preferential scheme, and enlarging the import quota. The ASEAN side stated that the ASEAN countries appreciated the statement made by Prime Minister Nakasone during his recent visit to the ASEAN countries in which he said, "Japan will continue to take full heed of the wishes of the ASEAN countries and to endeavour to further open its market."
7. The Japanese side explained market-opening measures taken by the Government of Japan since the Fifth Japan-ASEAN Forum, January 1982, including elimination and relaxation of tariffs on certain products, relaxations of import restrictions, improvements in testing procedure for imported goods, the establishment of OTG and improvements in standards and certification systems. Also explained was the consideration to enlarge the total ceiling quota on GSP industrial products by about 50 percent in FY 1984. As to ASEAN export products to Japan, the Japanese side stated, among others, that it would take into consideration the statement of Prime Minister Nakasone on the reduction of tariffs on bananas, boneless chicken and palm oil which was made during his recent visit to the ASEAN countries.
8. The Meeting agreed that close ASEAN - Japan cooperation had contributed to the success of various international efforts to solve commodity problems.
9. The Meeting noted that the Japan - ASEAN Development Corporation will engage in investment for and financing of ASEAN projects initiated by ASEAN Finance Corporation and expressed the hope that the Development Corporation will expand to enable further promotion of Japan - ASEAN relations.
10. The Meeting expressed satisfaction that the ASEAN Regional Studies Promotion Programme has been successfully launched and that the Overview Papers on the research theme of Japan - ASEAN industrial cooperation would be completed in July 1985. The Meeting, however, felt that for the programme to continue on a viable basis, adequate and assured support would be necessary. In this regard, the ASEAN side welcomed the Japanese Government's decision to allocate Y 60 million for the Project in FY 1983.

11. The Meeting concurred that the economic and technical cooperation between Japan and ASEAN was progressing smoothly and agreed to explore further possibilities of promoting such cooperation in agricultural developments, energy development, and other fields. As a tangible result of the discussions it was agreed that both sides would start preparation to set up the Poultry Disease Research and Training Centre as an ASEAN - Japan cooperation project.

12. The Meeting noted with satisfaction the smooth progress of the ASEAN Human Resources Development Project and expressed its appreciation and hope that the project will contribute to the nation building of ASEAN member countries and the welfare of the people of ASEAN.

13. The Meeting noted with appreciation the initiative taken by Prime Minister Nakasone on the occasion of his recent visit to the ASEAN countries to promote Japan-ASEAN cooperation in the field of science and technology, which was welcomed by all the leaders of the ASEAN countries.

14. The Meeting agreed that Japan - ASEAN cooperation in science and technology should be developed and strengthened on a continuing basis and noted that in this regard sound financial arrangement should be assured.

15. The Meeting took note of Japan's intention to

despatch a mission at the earliest possible date to ASEAN countries in order to study the present and future needs of the ASEAN countries, and to explore opportunities for future cooperation in the field of science and technology, with a view to making the proposed Ministerial Meeting a success.

16. It further noted the suggestion by Japan that the Ministerial Meeting be convened towards the end of 1983.

17. The Meeting noted with satisfaction the progress made on various cultural programmes implemented under the ASEAN Cultural Fund as well as the utilization of Japan's Scholarship for ASEAN Youth provided since 1980.

18. With regard to "The Friendship Programme for the 21st Century" proposed by Prime Minister Nakasone during his recent visit to the ASEAN countries, the Japanese side explained the outline of the programme for the information of the ASEAN countries, and agreed to consult with them concerning its implementation.

19. The Seventh Meeting of the Japan - ASEAN Forum will be held in Indonesia at a date to be mutually agreed upon in 1984.

20. The ASEAN Delegations expressed their appreciation to the Government of Japan for hosting the Sixth Meeting of the Japan - ASEAN Forum and for the hospitality accorded to them.

199. JOINT COMMUNIQUE OF THE
SEVENTH ASEAN - JAPAN FORUM
BALI, 4 - 6 OCTOBER 1984

1. The Seventh Meeting of the ASEAN - Japan Forum was held in Bali, Indonesia, from 4 - 6 October 1984. The Meeting was attended by the Director of Protocol and Consular Affairs of Brunei Darussalam, the Director-General, ASEAN - Indonesia, Director-General, ASEAN - Malaysia, Director-General, ASEAN - Philippines, Director-General, ASEAN - Singapore, the Deputy Director-General, ASEAN - Thailand and the Deputy Director-General of the Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan and their respective delegations. The Chairmen of COTT, and COSD, representatives of the Chairmen of COFAF, COTAC, COIME, COCI and COST, as well as officials of the ASEAN Secretariat were also in attendance.
2. The Meeting was officially opened by H.E. Mr. Ismail Saleh the Minister for Foreign Affairs a.i. of the Republic of Indonesia in a ceremony attended by the Governor of the Province of Bali, the delegates of Japan and ASEAN countries and dignitaries of the local government.
3. The Leader of the Indonesian Delegation, Mr. Adiwoso Abubakar, acted as Spokesman for the ASEAN Delegations. The Japanese Delegation was led by Mr. S. Yanai, Ministry of Foreign Affairs of Japan.
4. Brunei Darussalam, which joined ASEAN in January 1984, participated in the ASEAN - Japan Forum for the first time. The Minister for Foreign Affairs a.i. of the Republic of Indonesia extended a warm welcome to Brunei Darussalam on this occasion. The Head of the Japanese Delegation joined the Foreign Minister a.i. of the Republic of Indonesia in welcoming Brunei Darussalam.
5. The Meeting discussed a wide range of subjects on ASEAN - Japan cooperation in the fields of Trade and Commodities Investment, Industry, Finance, as well as Economic, Social, Technical and Cultural Cooperation.
6. In assessing the ASEAN - Japan Forum and the results achieved so far, both sides agreed that the Forum has an important role in expanding economic, cultural and social relations between Japan and ASEAN countries and in promoting better understanding between their peoples.
7. The Meeting reaffirmed the great importance they attached to their trade relations and agreed on the need to continue efforts to increase two-way trade.
8. The Japanese side stated that ASEAN countries are one of the biggest trading and investment partners. Japan regarded ASEAN as a high priority region in the fields of economic and technical cooperation.
9. The Japanese side explained that since 1981 it had taken a series of such market opening and import promotion measures as those for improvements of its GSP (generalized system of preferences) with its extension for another 10 years in 1981, reduction in tariff rates and import restriction, improvement of the standards and certification systems, establishment of the Office of Trade Ombudsman and others.
10. The ASEAN side, however, felt that those market opening measures did not meet the specific interests of ASEAN countries. In the latest round of tariff reductions of the affected items, ASEAN share of the total Japanese imports was minimal while the developed countries enjoyed the preponderant share. The ASEAN side stressed that trade was of vital importance to ASEAN and cooperation between ASEAN and Japan on trade matters should be improved.
11. The Meeting noted that close ASEAN - Japan cooperation on commodity issues had contributed significantly to the various international efforts to solve commodity problems and agreed that ASEAN and Japan should strengthen such cooperation.
12. The Meeting also agreed that every opportunity should be taken by ASEAN member countries as well as Japan to impress upon the developed countries concerned of the need for collaboration in mutually agreeable measures for the common good of both producers and consumers.

13. The Meeting agreed that the economic and technical cooperation was progressing smoothly and therefore agreed to further explore possibilities of promoting such cooperation in agricultural development, energy development, plant renovation and other fields. In this connection, the ASEAN side submitted new project proposals in the agricultural, science and technology and social development areas. The Japanese side indicated initial positive response on some of the proposals, which would be firmed up after they had studied the project proposal further in Tokyo.

14. The Meeting noted with satisfaction the smooth progress made in the ASEAN Human Resources Development Project.

15. The Meeting expressed the hope that the First ASEAN - Japan Ministerial Meeting on Science and Technology held in Tokyo in December 1983 will form a solid basis for more concrete cooperation in Science and Technology. Satisfactory preparation should be made so that the next Ministerial Meeting could bring tangible results.

16. The Meeting noted with satisfaction the progress made on various cultural information

programmes implemented under the ASEAN Cultural Fund as well as the utilization of Japan's scholarship for ASEAN Youth.

17. The Meeting also expressed satisfaction at the progress made in the implementation of the Friendship Programme for the 21st Century. The Meeting agreed to the desirability of a joint evaluation meeting which may be convened in Japan and expected that the next year programme would be further improved. In connection, the Meeting took note of the various suggestions for further improvements of the programme such as inclusion in the visit the possibility for the participants being further exposed to professional skill.

18. The Eighth Meeting of the ASEAN - Japan Forum will be held in Japan at a date in 1985 to be mutually agreed upon.

19. The Japanese Delegation and the Delegations of Brunei Darussalam, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand expressed their appreciation to the Government of the Republic of Indonesia for hosting the Seventh Meeting of the ASEAN - Japan Forum and for the hospitality accorded to them.

200. JOINT PRESS RELEASE OF THE
EIGHTH ASEAN - JAPAN FORUM
TOKYO, 23 - 24 JULY 1986

1. The Eighth Meeting of the Japan - ASEAN Forum was held in Tokyo, Japan, on 23 - 24 July 1986.

The Meeting was attended by the Director-General of Asian Affairs Bureau, the Ministry of Foreign Affairs of Japan, Director-General, ASEAN - Brunei Darussalam, Director-General, ASEAN - Indonesia, Director-General, ASEAN - Malaysia, Deputy Director-General, ASEAN - Philippines, Director-General, ASEAN - Singapore, Director-General, ASEAN - Thailand and their respective delegations.

The Secretary General of ASEAN Secretariat, the Chairmen of COTAC and COTT and a representative of COFAB were present.

2. The Minister for Foreign Affairs of Japan extended in his message his heartfelt congratulations on the opening of the Meeting.

3. Mr. Kimio Fujita, Director-General, Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan, was the leader of the Japanese Delegation. The ASEAN Delegations were led by Ambassador Abdullah Zawawi Haji Mohamed, Director-General, ASEAN - Malaysia, Ministry of Foreign Affairs.

4. Mr. Kimio Fujita expressed his heartfelt welcome to the ASEAN Delegations and stated that he was pleased with the fact that numerous efforts had been made to develop closer cooperative relations between Japan and ASEAN. Furthermore, referring to the speech delivered by former Foreign Minister Abe in Manila on Japan's policy towards Asia, Mr. Fujita said that there had never been greater need than any time before for Japan and ASEAN countries to work together and to fully promote their 'creative partnership' in order to overcome the confronting difficulties.

5. The Meeting discussed a wide range of subjects covering International Economic situations, Trade and Primary Commodities, Investment, Economic Cooperation, Cultural Cooperation and so forth.

6. The Meeting recognized that the world economy continues to face difficulties which have been particularly burdensome to developing countries including ASEAN countries. It considered the problems within the context of ASEAN - Japan economic relations including sluggishness of trade and investment flows between two sides. In view of the recent dramatic appreciation of the yen, the meeting agreed that opportunities exist for further improvement on ASEAN - Japan economic relations by means of increasing the flow of Japanese investment to ASEAN, increasing more ASEAN exports to Japan, and encouraging more tourists from Japan to ASEAN countries.

7. The ASEAN side expressed that much more could be done for further market opening measures in Japan such as an improvement of Generalized System of Preferences (GSP), lowering of tariffs and expansion of Import Quotas, and the need for Japan to take into account of ASEAN's export interests in formulating her future market opening measures.

8. The Japanese side explained that a steady implementation of the Action Programme would be further pursued including the improvement of GSP.

9. Both sides noted the importance of launching New Round of MTN at the GATT Ministerial Meeting in September 1986 and stated that they would continue their efforts toward achieving the objective.

10. The Meeting recognized that the sharp decline of commodity prices continues to be a source of great difficulty to ASEAN and other developing countries. The two sides reiterated their willingness to address themselves positively to seek solutions to these problems.

11. The Meeting expressed the view that Japanese investment in ASEAN countries is of a vital importance to economic development in the region. In the light of the sluggish trend in ASEAN's relative share of Japan's direct overseas investment, both sides shared the view that they would cooperate to create an environment conducive to increasing the flow of investment from Japan to the ASEAN countries. In this connection, Japan stressed that a further government-business coordination should be explored, and proposed to consider convening of a symposium, where experts from government and private sectors from both Japan and ASEAN countries could share the expertise on how to promote investment and transfer of technology.

12. The ASEAN side agreed in principle to the convening of the symposium and waits for detailed plan to be submitted by Japan.

13. The Meeting expressed satisfaction that economic and technical cooperation between ASEAN and Japan had been carried out smoothly and effectively. It expressed the hope that the possibilities of cooperation in such fields as agricultural development, energy development, and industrial plant renovation would further be explored. With regard to the new project proposals

presented by the ASEAN side in transportation, industry, forestry, finance and health, the Japanese side expressed initial positive response.

14. The Meeting noted with particular satisfaction that ASEAN Human Resources Development Project had been making smooth and significant progress.

15. The Meeting took note of important developments in cooperation in the field of science and technology and expressed the view that there were good prospect for stepping up cooperation in this area.

16. The Meeting reaffirmed the usefulness of cultural exchange programmes carried out under the ASEAN Cultural Fund and also the Japan Scholarship for ASEAN Youth.

17. The Meeting noted with special satisfaction that the Friendship Programme for the 21st Century had been effective in promoting people-to-people level contact and understanding between ASEAN and Japan.

18. The Ninth Meeting of the Japan - ASEAN Forum will be held in some ASEAN city in 1987 at a date to be mutually agreed upon.

19. The Delegations from Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, the Philippines, Singapore and Thailand expressed their appreciation to the Government of Japan for hosting the Eighth Meeting of the Japan - ASEAN Forum and for the hospitality accorded to them.

201. JOINT PRESS RELEASE OF THE
NINTH ASEAN - JAPAN FORUM
MELAKA, MALAYSIA, 22 - 23 JULY 1987

1. The 9th Meeting of the ASEAN - Japan Forum was held in Melaka, Malaysia on 22 - 23 July 1987. The Meeting was attended by the Deputy Director-General, the Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Japan; Director-General, ASEAN - Brunei Darussalam; Director-General, ASEAN - Indonesia; Deputy Director-General, ASEAN - Philippines; Director-General, ASEAN - Singapore; Director-General, ASEAN - Thailand and their respective delegations. The Secretary-General of the ASEAN Secretariat, the Chairmen of COTT and COCI, and representatives from other ASEAN Committees were present.
2. His Excellency Datuk Seri Abdul Rahim bin Datuk Tamby Chik, the Chief Minister of Melaka, formally opened the 9th Meeting of ASEAN - Japan Forum.
3. Ambassador Dato' Abdullah Zawawi bin Haji Mohamad, Director-General of ASEAN - Malaysia, Ministry of Foreign Affairs led the ASEAN delegations. The Japanese delegation was led by Mr. Haruhiko Shibuya, Deputy Director-General, Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Japan.
4. The Chief Minister in his opening statement, said that ASEAN and Japan had laid a strong foundation for their cooperation. The Chief Minister expressed optimism that continued consultations of this nature would result in greater overall forward movement in ASEAN - Japan cooperation in trade, industry and investment, market access for ASEAN products, transfer of technology and the much needed capital to boost and accelerate ASEAN's industrial growth.
5. The Meeting discussed a wide range of subjects such as specific trade issues and primary commodities, investment and industrial cooperation, the New Round of Multilateral Trade Negotiation, cooperation in economics, culture, science and technology. The Meeting also exchanged views on how best both sides could improve ASEAN Japan Development Cooperation for their mutual benefit.
6. ASEAN expressed its deep appreciation to the Government of Japan for its efforts aimed at the further enhancement of ASEAN - Japan cooperation. However, ASEAN believed that much more could be done by Japan to give greater substance and meaning to their continuing cooperation.
7. Japan referred to the statement of Foreign Minister Tadashi Kuranari on its intention to study ways and means of extending financial and technical cooperation with a view to assisting ASEAN's efforts in upgrading ASEAN economies through the development of the private industrial sectors. ASEAN reiterated the views of the ASEAN Foreign Ministers and ASEAN Economic Ministers welcoming the statement by Mr. Kuranari.
8. ASEAN and Japan exchanged views on the problems of falling commodity prices, declining trend of ASEAN's trade with Japan and problems pertaining to market access for ASEAN's manufactured goods. As regards commodities Japan stated that its government would make further efforts for the proper solution of primary commodity problems by maintaining close cooperation with countries concerned. Japan also indicated that it would participate in the INRA in 1987 as soon as possible and continued to cooperate in the effective functioning of the agreement. ASEAN requested for improvement in Japan's GSP Schemes as well as the removal of some of the impediments to the expansion of the export of ASEAN to Japan.
9. The Meeting welcomed the renewal of the Agreement on ASEAN Promotion Centre (APC) in Tokyo for another Five Years beginning May 1987 to May 1992 and that the restructured APC would contribute positively in the promotion of ASEAN

export to Japan and in the flow of Japanese capital and tourists to the ASEAN region.

10. The Meeting shared the view on the importance of maintaining and strengthening the open multilateral trade system through active and concerted negotiations of the Uruguay Round. Japan stated that it would contribute actively to these negotiations, maintaining close and cooperative relations with ASEAN countries on issues of concern to them and other developing countries.

11. Japan informed the Meeting that its overseas investments have been increasing as Japanese enterprises transfer their production facilities abroad due to among others, the Yen appreciation. ASEAN reiterated the hope that this development would lead to the further increase in the flow of investments into the region. The Japanese stated that it had also helped its private overseas investment by creating conditions conducive to the expansion of Japan's private overseas investment. It has, for instance, established greater coverage of its overseas investment insurance scheme.

12. The Forum also deliberated extensively on aspects of development and cultural cooperation. ASEAN proposals including those pending since the 8th ASEAN - Japan Forum were discussed. In addition, new project proposals were presented for consideration by Japan. In this connection, ASEAN strongly urged Japan to take further measures to assist ASEAN countries' economic development efforts.

13. The delegations from Japan, Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand expressed their appreciation to the Government of Malaysia and the State Government of Melaka for hosting the 9th Meeting of ASEAN - Japan Forum and for the hospitality extended to them.

14. The 10th Meeting of the ASEAN - Japan Forum, would be held in Japan in 1988 at a date to be mutually agreed upon.

JOINT PRESS RELEASE
TENTH ASEAN - JAPAN FORUM
TOKYO, JAPAN 21 - 22 SEPTEMBER 1988

1. The Tenth ASEAN - Japan Forum was held in Tokyo, Japan on 21 - 22 September 1988. The Meeting was attended by the Director-General of the Asian Affairs Bureau of the Ministry of Foreign Affairs, Japan; the Directors-General of ASEAN - Brunei Darussalam, ASEAN - Indonesia, ASEAN - Malaysia, ASEAN - Philippines, ASEAN - Singapore, and ASEAN - Thailand, and their respective delegations. Also in attendance were the Secretary-General of the ASEAN Secretariat and members of his staff, the Chairmen of the ASEAN Committee on Trade and Tourism (COTT), Committee on Food, Agriculture and Forestry (COFAF) and the representatives of the Chairmen of COIME and COTAC.
2. Mr. T. Hamada, Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan, formally opened and delivered a Welcome Speech at the 10th ASEAN - Japan Forum.
3. In his Welcome Speech, Mr. Hamada expressed his heartfelt welcome to the ASEAN delegations and stated that Japan - ASEAN Forum has contributed immensely to the promotion of mutual understanding between Japan and ASEAN and to the solution of many issues.
4. Mr. K. Hasegawa, Director-General, Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Japan, led the Japanese delegation. Mr. Juanito P. Jarasa, Director-General, ASEAN - Philippines and representing the country coordinator of the ASEAN - Japan Dialogue, led the ASEAN delegations. Messrs. Hasegawa and Jarasa co-chaired the 10th Forum Meeting.
5. The Meeting discussed a wide range of topics of mutual interest to ASEAN and Japan, including the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, trade and commodities, investment and industrial cooperation and development and cultural cooperation. The meeting also reviewed developments during the past year in ASEAN - Japan relations particularly in relation to the results of the Third Meeting of ASEAN Heads of Government in Manila on 14 - 16 December 1987.
6. ASEAN expressed its deep appreciation to the Government of Japan for its efforts to enhance ASEAN - Japan cooperation, noting in particular the launching of the ASEAN - Japan Development Fund (AJDF) and the Japan - ASEAN Comprehensive Exchange Programme (JACEP) and the unveiling of policies to promote and strengthen economic cooperation and cultural exchanges. ASEAN was of the hope that gestures of similar nature would continue to be extended by Japan in order to further substantiate and give meaning to ASEAN - Japan cooperation.
7. In recognition of the important role that the private sector could play in the enhancement of the ASEAN - Japan Dialogue, particularly in the area of trade and investment cooperation, the Meeting agreed to explore further the possibility of the meaningful participation of the private sector in the ASEAN - Japan Dialogue process, including the active involvement of the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) and the ASEAN Promotion Centre (APC) in this initiative.

8. The Meeting attached great importance to the forthcoming Mid-Term Review of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, stressing its value not only in giving impetus to the negotiation but also in accommodating the concern, legitimate interests and development priorities of developing countries. Japan assured the Meeting that it would actively participate in the negotiations and keep close consultations with ASEAN on issues of concern to the latter and other developing countries.

9. ASEAN noted that there has been a stagnation in the total trade between ASEAN and Japan from a level of US\$ 37.6 billion in 1980 to US\$ 35.2 billion in 1987, and the pattern of trade too has not basically changed with ASEAN exports to Japan consisting mainly of mineral fuel and raw materials. However, the Meeting noted the fact that Japan's imports of manufactured goods from the ASEAN countries increased by 47.8% in 1987 over the previous year.

10. The Meeting welcomed Japan's new economic policy to provide a sound world trading environment, improve market access and play a more active role in the growth of Asia-Pacific region. However, ASEAN commodities are still faced with trade and other barriers in the Japanese market. ASEAN therefore, looks forward to Japan's lowering its tariffs and eliminating some of its non-tariff barriers on commodities, both processed and semi-processed, and manufactured products of interest to ASEAN in order to increase their competitiveness in the Japanese market. ASEAN expressed the need for possible improvement of Japan's GSP in respect of these products in order to facilitate their entry into the Japanese market.

11. ASEAN recognized the important role that Japan could play in the development of the region's economies through the increased flow of Japanese investments. While ASEAN noted that ASEAN's share in Japanese overseas investments remains far below that of major countries, Japan pointed out that Japanese investment to ASEAN

has increased considerably and shown a noteworthy increase in the manufacturing sector in comparison with other countries. The Meeting emphasized the importance of taking measures aimed at increasing the flow of Japanese investments to ASEAN.

12. On cultural cooperation, ASEAN acknowledged the positive contribution of the ASEAN Cultural Fund. In connection with the proposal of the Japanese Foreign Minister at the ASEAN Post Ministerial Conference (6 + 1) with Japan in Bangkok on 8 July 1988, the Meeting agreed to pursue projects and activities that would promote two-way personal cultural exchanges between ASEAN and Japan. These activities could be pursued under the Japan - ASEAN Comprehensive Exchange Programme (JACEP).

13. In the area of development cooperation, Japan expressed the intention to fund five projects under the Inter-ASEAN Technical Exchange Programme (IATEP) which would be implemented within FY 1988. The Meeting expressed satisfaction over the progress of the various components of the ASEAN - Japan Human Resources Development (HRD) Project. New project proposals as well as those presented at the 9th ASEAN - Japan Forum were discussed. The Meeting agreed that stronger measures could be taken by Japan to help ASEAN member countries implement the above proposals.

14. The Meeting welcomed Brunei Darussalam's becoming a party to the Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre (APC). Japan also welcomed Brunei Darussalam's participation in the Japan Scholarship Fund for ASEAN Youth.

15. The ASEAN delegations expressed their appreciation to the Government of Japan for hosting the 10th ASEAN - Japan Forum. The 11th ASEAN - Japan Forum will be held in Manila at a date to be mutually agreed upon.

**JOINT PRESS RELEASE
ELEVENTH MEETING OF THE ASEAN-JAPAN FORUM
MANILA, PHILIPPINES, 3-4 OCTOBER 1989**

The 11th Meeting of the ASEAN-Japan Forum was held in Manila, Philippines on 3-4 October 1989. The Meeting was attended by Mr. Sakutaro Tanino, Director-General of the Asian Affairs Bureau, Japan, Mr. Hj. Yusof bin Hj. Abdul Hamid, Director-General, ASEAN-Brunei Darussalam; Mr. Husni Thamrin Pane, Director-General, ASEAN-Indonesia; Mrs. Solita M. Aguirre, Acting Director-General, ASEAN-Philippines; Mr. Ajit Singh, Director-General, ASEAN-Malaysia and Mr. K. Kesavapany, Director-General, ASEAN-Singapore and Dr. Somkiati Ariyaprichya, Deputy Director-General, ASEAN-Thailand and their respective delegations. Mr. Rusli Noor, Secretary-General of the ASEAN Secretariat, the Chairman of the ASEAN Committee on Trade and Tourism and Committee on Investment, Minerals and Energy and representatives from the ASEAN Committee on Science and Technology, the ASEAN Committee on Culture and Information, the ASEAN Committee on Social Development, the ASEAN Committee on Industry, Minerals and Energy and the ASEAN Committee on Transportation and Communications were also present.

Honorable Manuel T. Yan, Acting Secretary of Foreign Affairs of the Philippines opened the 11th ASEAN-Japan Forum.

Counsellor Solita M. Aguirre, Acting Director-General of ASEAN-Philippines led the ASEAN delegations. The Japanese delegation was led by Mr. Sakutaro Tanino, Director-General, Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Japan.

In his Keynote Address, the Acting Secretary of Foreign Affairs, stated that the necessary framework designed to fortify ASEAN-Japan cooperation was sharpened with the launching of Japan's International Cooperation Initiative (ICI). He, however, stressed that the elements of the ICI should be translated into more concrete terms and that the future of the ASEAN-Japan Forum could be indicative

of further successes or need for closer observance of the ICI in the ASEAN region.

After thanking Japan for the various forms of assistance it has extended to ASEAN's socio-cultural and scholarship training projects, Under-Secretary Yan indicated that ASEAN would reiterate some pressing and important trade concerns with Japan. Undersecretary Yan expressed the hope that the new phase in ASEAN-Japan relations would be characterized by openness and progressiveness as it enters the decade of the nineties. He expressed confidence that with ASEAN's endeavours to actively pursue better economic opportunities for the development of the region and Japan's enhanced capabilities and policy of Japan Contributing to a Better World, "the time is most propitious for ASEAN and Japan to achieve concrete results in their collaborative efforts to preserve and enhance a prosperous and peaceful Southeast Asian region", an environment that augurs well for the continued progress and prosperity of Japan.

The Meeting reviewed ASEAN-Japan dialogue relations, particularly the activities that were undertaken during the past year. The Meeting discussed international economic issues, with particular attention to the Uruguay Round of the Multilateral Trade Negotiations (MTN) and the Meeting of the Industrialised Countries (G-7) in Paris in July 1989; trade issues and related matters; commodity issues as well as issues related to investments and industrial cooperation and financial cooperation issues. The Meeting also reviewed the cultural cooperation programs between ASEAN and Japan.

The status and progress of development cooperation projects assisted by Japan under its various schemes such as the Japan-ASEAN Cooperation Promotion Programme (JACPP), the ASEAN-Japan Exchange Project (JAEP) and the Inter ASEAN

Technical Exchange Program (IATEP) were also considered and assessed.

In the discussions on the Uruguay Round (UR) of the MTN, ASEAN urged Japan to continue its support to ASEAN in the UR deliberations and to play a more constructive role in expediting the process of the post-Montreal negotiations, taking into account the sectors of priority interest to ASEAN such as issues relating to standstill and rollback commitments, agriculture, tropical products, tariffs and non-tariff barriers.

Japan expressed its intention to contribute, in close cooperation with ASEAN countries, to the progress of the negotiations so that a substantive agreement could be achieved by the end of 1990 as scheduled.

On commodity issues, ASEAN reiterated to Japan the importance of improving cooperative efforts in areas of common concern such as the development of resource-based industries, research and development activities for certain commodities and the Common Fund for Commodities. Japan recognized the significance of commodities to ASEAN's economy and expressed willingness to cooperate with ASEAN countries in these areas. Problems relating to commodity trade patterns and market access were also discussed, particularly the concern to liberalize the Japanese market on processed and semi-processed commodity-based products from ASEAN.

ASEAN noted that despite the various market opening measures undertaken by Japan, ASEAN exports, in particular manufactured products to Japan, have not significantly improved. In this respect, ASEAN urged Japan to continue its efforts to improve its market access for products of interest to ASEAN, particularly improvements to its GSP scheme and liberalization of its import policies, procedures and documentation. Japan explained that it has been making and would continue to make its best possible efforts for the improvement of its market access for ASEAN products in various fields, including GSP. Japan pointed out that such efforts, coupled with ASEAN's own export promotion efforts, resulted in an increase in Japanese imports of manufactured goods from ASEAN countries by 49% over the previous year. Japan expressed its readiness to hold a Trade Experts' Meeting a day before or even at an earlier time before the 12th ASEAN-Japan Forum.

In recognition of the important role played by the private sector in the developmental process, ASEAN and Japan agreed on private sector participation starting from the 12th ASEAN-Japan Forum to be held in 1990 in Japan.

Japan noted with gratification that the amount of its direct investment in ASEAN countries in FY 1988 increased by 78% over the previous year. ASEAN noted with appreciation Japan's increased direct investments manifesting its confidence in ASEAN's potentials. However, ASEAN urged a bigger share of Japan's total overseas investments with the request that it take active measures to attain this objective such as relocation of Japanese industries which are heavily dependent on raw material supply, to the ASEAN region. Both sides expressed the hope that the upward trend would continue and that more Japanese enterprises would actively participate in the ASEAN Industrial Joint Ventures (AIJV) and the Brand-to-Brand Completion Schemes.

On financial cooperation, the Forum noted that to date only Malaysia has implemented the Agreement on the ASEAN-Japan Development Fund (AJDF) while Thailand and Indonesia have recently reached agreements with Japan on the AJDF. ASEAN reiterated the need for an early agreement between Japan and the other ASEAN member countries so that the AJDF could be fully effected in the ASEAN region.

ASEAN reiterated to Japan its concern over the continuing appreciation of the Yen and called on Japan to implement policy measures that would further alleviate problems associated with the Yen's appreciation, including the burden of debt servicing. Recognising this concern, Japan stated that it has twice reduced its interest rates on its ODA resulting in the 1.0% reduction on the average and that it hopes to contribute to the substantial alleviation of the debt burden by, among others, further extension of ODA loans.

ASEAN and Japan deliberated on aspects of development cooperation. Pending proposals were discussed and new projects were presented. ASEAN expressed the hope that development cooperation projects could be implemented more expeditiously. ASEAN also urged Japan to be more flexible in considering ASEAN project proposals for funding under its existing development aid pro-

grammes. Japan, on its part, requested ASEAN to submit new project proposals within the existing cooperation schemes, as far as possible.

In presenting to Japan a status report on the various projects under its cooperation scheme with Japan, ASEAN also reiterated its gratitude for the continuous support it had provided to these projects. Japan expressed its satisfaction that a wide range of cooperation between ASEAN and Japan had already resulted in concrete projects in various areas such as economic cooperation and cultural exchange.

With regard to cooperation in the years to come, ASEAN expressed its hope that they can work

together in enhancing regional economic cooperation, resolving environmental issues and meeting ASEAN's needs in the field of technology. Japan expressed its readiness to study relevant proposals of ASEAN.

The delegates from Japan, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand expressed their appreciation to the Government of the Philippines for hosting the 11th Meeting of ASEAN-Japan Forum and for the hospitality extended to them.

The 12th Meeting of the ASEAN-Japan Forum would be held in Japan in 1990 at a date to be mutually agreed upon.

JOINT PRESS RELEASE
 THE TWELFTH MEETING OF THE ASEAN-JAPAN FORUM
 TOKYO, JAPAN, 19-20 September 1990

The 12th Meeting of the ASEAN-Japan Forum was held in Tokyo, Japan on 19-20, September 1990. The Meeting was attended by Mr. Sakutaro Tanino, Director-General of the Asian Affairs Bureau, Japan; Mr. Hj. Yusof bin Hj. Abdul Hamid, Director-General, ASEAN-Brunei Darussalam; Mr. Agus Tarmidzi, Director-General, ASEAN-Indonesia; Dato Ajit Singh, Director-General, ASEAN-Malaysia; Mrs. Solita M. Aguirre, Acting Director-General, ASEAN-Philippines; Mr. K. Kesavapany, Director-General, ASEAN-Singapore and H.E. M.L. Bira-bhongse Kasemsri, Ambassador of Thailand to Japan and their respective delegations. Dr. Chng Meng Kng, Deputy Secretary-General of the ASEAN Secretariat, and a member of his staff together with the chairmen of COTT and COCI and the representatives of COTAC, COFAF and COFAB were also present.

Mr. S. Tanino, Director-General, Asian Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Japan, led the Japanese delegation. Mrs. Solita M. Aguirre, Acting Director-General, ASEAN-Philippines and representing the country coordinator of the ASEAN-Japan Dialogue, led the ASEAN delegations. Mr. Tanino and Mrs. Aguirre co-chaired the 12th Forum meeting.

Mr. Ichiji Ishii, Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan, formally opened and delivered a Welcome Speech at the 12th ASEAN-Japan Forum.

In his Welcome Speech, Mr. Ishii expressed his heartfelt welcome to the ASEAN delegations and stated that the ASEAN-Japan Forum has played an important role in promoting a close and friendly relationship between Japan and ASEAN and thereby contributing to the solution of many issues of bilateral, regional and global nature.

In his statement on the review of ASEAN-Japan relations, Mr. Tanino stated that stimulating

discussions on the security issues in the Asia-Pacific region at the Post-Ministerial Conference in Jakarta last July clearly showed how mature the relationship between ASEAN and its Dialogue Partners had become. He also stressed that through their development in the last two decades, ASEAN countries had attracted world attention as the most dynamic group of nations in the Asia-Pacific region and had been highly respected for their great contribution to the peace and stability of Asia as well as of the whole world.

As regards economic issues, he expressed his satisfaction that the recent dramatic increase of trade, investment and others between Japan and ASEAN proved it as appropriateness of the policies on trade and industry and a structural adjustment.

As regards economic cooperation, he regretted that because of insufficient understanding of each others' policies and system, many existing co-operation schemes had not been fully utilized.

He also touched upon the Japan-ASEAN Cultural Symposium to be held at the beginning of next year in commemoration of the first anniversary of ASEAN Cultural Center in Tokyo. In addition, he made clear willingness of the Japanese Government to initiate and step up cooperative relations in new fields such as the global environment.

In her opening statement, Mrs. Aguirre said that the time was ripe for ASEAN and Japan to inject fresh ideas and new thinking in the conduct of ASEAN-Japan relations, and that ASEAN highly appreciated the convening of the Trade Experts Meeting and the involvement of private sector in the Forum.

As regards trade issues, she expressed the concern on continuing imbalance in the ASEAN-Japan trade structure, while urging Japan to

import more manufactured and semi-manufactured products from ASEAN.

As regards other areas of cooperation, she highlighted, ASEAN priorities, including the importance of social development and science and technology, and urged Japan's assistance for the Social Development Fund and the Science Fund.

The Meeting reviewed developments during the past year in ASEAN-Japan relations and ASEAN noted with appreciation various contributions of Japan along with its International Cooperation Initiative.

The Meeting also reviewed wide-ranging topics of mutual interest to ASEAN and Japan, including the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, trade and commodities, investment and industrial cooperation and development and cultural cooperation.

In the discussions on the Uruguay Round, the Meeting agreed that a successful conclusion of the Uruguay Round by the end of this year was of utmost importance for the future trade environment of the world. ASEAN urged Japan to support ASEAN's positions and to meet its requests in such negotiation fields as textile and clothing, agriculture, tropical product and new areas.

Japan reiterated its resolve to contribute, in close cooperation with ASEAN countries, to the success of the Round.

For the first time, representatives of the ASEAN-Japan Economic Council (AJEC) participated in this Forum according to the agreement at the last Forum in Manila. Mr. Masami Ishii, Vice-Chairman of the Japan Section, and Mr. Rufu Colayco, Chairman of the ASEAN Section made their respective reports to the Forum, in which they manifested the private sectors' high expectation and demand for the governments. The Meeting appreciated the valuable suggestions in their reports and stressed the importance of closer collaboration between government and private sectors.

The Meeting took note of the report of Trade Experts Meeting, which was held for the first time between ASEAN and Japan, in order to deepen their mutual understanding by frank exchange of views on trade and trade-related measures.

Both ASEAN and Japan reiterated the importance of sustainable development of tropical forest based on the active participation of both developed and developing countries concerned, taking fully into account the need for technical and financial assistance for the developing countries in upgrading their tropical forest management and development.

Japan expressed its view that the increased direct investment by Japanese private firms in the ASEAN countries had contributed to the development of their economy and close economic relations among them.

ASEAN proposed to Japan specific projects which would further promote technology transfer from Japan to ASEAN and direct investment in the ASEAN region.

On financial cooperation, ASEAN expressed concern over the effects of the appreciation of the Yen, especially in the light of the recent development, and stressed the need for full implementation of the ASEAN-Japan Development Fund (AJDF) in order that it could be fully effected in the ASEAN region.

ASEAN and Japan deliberated on various aspects of development cooperation, and ASEAN reiterated the hope that Japan should be more flexible in considering ASEAN project proposals for funding.

The delegates from Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand expressed their appreciation to the Government of Japan for hosting the 12th Meeting of ASEAN-Japan Forum and for the hospitality extended to them.

The 13th Meeting of the ASEAN-Japan Forum would be held in Singapore in 1991 at a date to be mutually agreed upon.

**JOINT PRESS RELEASE
THIRTEENTH MEETING OF THE JAPAN-ASEAN FORUM
Tokyo, Japan, 16-17 February 1993**

The Thirteenth Meeting of the Japan-ASEAN Forum was held in Tokyo, Japan on 16-17 February 1993.

Delegates, Adoption of Agenda and Business Arrangements

Mr. Koichiro Matsuura, Deputy Minister for Foreign Affairs led the Japanese delegation. Mr. Peter Chan Jer Hing, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Singapore, representing the country coordinator of the ASEAN-Japan Dialogue, led the ASEAN delegation.

Mr. Kunihiro Saito, Deputy Minister for Foreign Affairs, Japan, served as the Japanese co-chairman during the discussion on regional political and security issues, and Mr. Matsuura did so for the other topics. Mr. Chan served as the co-chairman from the ASEAN side.

Review of Japan-ASEAN Relations

In his opening speech reviewing Japan-ASEAN relations, Mr. Matsuura indicated that this Forum, which convened Vice-Minister-level diplomats from both sides and included political and security issues on the agenda for the first time, marked a point of departure from previous Forum Meetings in its organization and structure. He stated that this attested to the further deepening of Japan-ASEAN relations.

He expressed the Japanese desire to conduct policy-oriented dialogue at this Forum, bearing fully in mind the four areas of future Japan-ASEAN cooperation given by Prime Minister Miyazawa in his Bangkok policy speech last month.

In his return speech, Mr. Chan expressed appreciation on behalf of ASEAN for the recent visit of Prime Minister Miyazawa to ASEAN countries to strengthen cooperation between ASEAN and Japan. In this context he added that ASEAN welcomed the significant proposals for political and economic cooperation between ASEAN and Japan that resulted from these visits. He noted that the growing linkages between ASEAN and Japan were a reflection of the maturity of the relationship and an expression of the interdependence of the two regions.

He emphasized the need for Japan and ASEAN to continue to strengthen both formal and informal relations for mutual benefit.

Mr. Chan stated that the inclusion of regional political and security issues on the agenda is most timely, and that ASEAN intends to continue its contribution for the peace and stability of the region with Japan and other friendly countries.

The discussions which followed the speeches were conducted from a broad and elevated point of view and covered a wide range of topics of mutual interest. In addition to the areas touched on in the speeches, the topics included international economic issues, bilateral economic issues, and development and cultural cooperation, as well as regional political and security issues and the safety of navigation in the Straits of Malacca.

Exchange of Views on Economic Issues

With regard to international economic issues, Japan and ASEAN agreed on the utmost importance of an early and successful conclusion of the Uruguay Round, and on their intention to work for the maintenance of a multilateral and open trading system which is the source of the dynamic economic development of the Asia-Pacific region. In this regard, both sides emphasized the continued importance of APEC, particularly with the establishment of the APEC Secretariat.

ASEAN explained that one of the primary purposes of AFTA was to create an incentive for investment to ASEAN from outside countries, and urged the Japanese government to take active interest in AFTA. Japan reiterated its welcome on ASEAN's initiative concerning AFTA. In this regard, Japan announced plans to hold an "AFTA Seminar" in Tokyo around late May with a view to promoting understanding on AFTA among Japanese private companies and encouraging their investment in ASEAN countries.

ASEAN and Japan also reviewed the latest developments in the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the Single European Market (SEM). Both sides were of the view that NAFTA and the SEM should be GATT-consistent and not become exclusive trade blocs, detrimental to the interests of third countries.

Bilateral Economic Issues

Japan and ASEAN discussed a number of specific matters in the area of bilateral economic relations and cooperation, covering ASEAN's market access requests, including Japan's GSP for ASEAN-processed products, Foreign Access Zones (FAZs), investment cooperation, commodities and financial cooperation.

Exchange of Views on Regional Political and Security Issues

The discussion on regional political and security issues dealt with : (1) security issues and security dialogues in the Asia-Pacific region; (2) the situation in East Asia; (3) Cambodia; (4) Japan's role in the region.

On the first sub-topic, Japan and ASEAN generally agreed in their assessment of the regional situation. They also concurred on the usefulness of political and security dialogues through existing fora in order to improve the understanding among the participants of regional trends and problems. ASEAN proposed convening a Senior Officials' Meeting (SOM) of the ASEAN Post-Ministerial Conferences (PMC). Japan welcomed the ASEAN proposal.

With regard to the South China Sea, Japan expressed its support for the ASEAN Declaration of the South China Sea.

Japan and ASEAN expressed their strong commitment to the Cambodian Peace Process implemented on the basis of the Paris Agreements. Both sides stressed the need for all Cambodians to exercise self restraint in order to ensure a neutral political environment, and agreed that every effort be made so that free and fair elections could be conducted in May. Both sides paid high tribute to the central role played by HRH Prince Norodom Sihanouk in the peace process and agreed to continue full support to UNTAC headed by Mr. Yasushi Akashi. Japan explained the proposal made by Prime Minister Miyazawa to establish a "Forum for Comprehensive Development of Indochina". ASEAN welcomed the Japanese initiative.

Japan expressed its intention to enhance its contribution on regional security. Japan repeated its resolve to never become a military power again. ASEAN expressed its appreciation for the Japanese explanation on its contribution to regional security.

Japan-ASEAN Cultural Cooperation

ASEAN expressed its wish to obtain Japan's continued support for projects in the field of culture.

Japan agreed with ASEAN on the importance of cultural exchange as an important component of Japan-ASEAN cooperation and its wish to introduce the cultures of ASEAN to Japan. Japan announced that the High-level International Conference for Safeguarding and Development of the Historical Area of Angkor will be held in Tokyo in autumn this year.

Safety of Navigation in the Straits of Malacca

ASEAN emphasized the need to address the issue of safety of navigation in the Straits of Malacca in a comprehensive manner, including the need to conduct a second study of the Straits of Malacca. Japan concurred on the importance of this safety, and introduced the forms of contribution it has been making for this goal. ASEAN informed Japan of the proposal to convene an international conference to discuss the safety of navigation and control of pollution in the Straits of Malacca.

Report of the ASEAN-Japan Economic Council

In the report of the ASEAN-Japan Economic Council, Mr. Shinroku Morohashi, Vice Chairman of the Japan Section of AJEC, and Mr. Tan Eng Joo, Chairman of the ASEAN Section, presented their respective reports to the Forum. Mr. Yutaka Nomura, Secretary General of ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism also made a presentation on the Centre's various activities.

In his paper, Mr. Morohashi stressed the importance of fostering ASEAN supporting industries and promoting investment by Japanese small and medium-size industries. Mr. Tan evaluated economic relations between Japan and also emphasized that the private sector should be invited to participate in all discussions on bilateral and international economic matters at the Forum. Japan stated that it would consider, in consultation with ASEAN countries, an appropriate formula for greater participation of the private sector in future Forum meetings. The Meeting agreed to study the substantive issues raised by the private sector of both sides.

The delegations from Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand expressed their appreciation for the Government of Japan in hosting the Thirteenth Meeting of the ASEAN-Japan Forum and for the hospitality extended to them.

The Fourteenth Meeting will be held in ASEAN at a date to be mutually agreed upon.

Doktrin Yoshida

1. *Japan's economic rehabilitation must be the prime national goal. Political-economic cooperation with the United States was necessary for this purpose.*
2. *Japan should remain lightly armed and avoid involvement in international political strategic issues. The Self-Defense Forces would not be deployed abroad. Japan would not participate in collective defense arrangements. Not only would this low military posture free the energies of its people for productive industrial development, it would prevent divisive domestic political struggles.*
3. *To gain long term guarantee of its own security, Japan would provide bases for the U.S Army, Navy and Air Force.*

